



LAKIP

**DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2016**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2016 ini disusun untuk memenuhi Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Pendidikan No. 29 Tahun 2010 tentang Penyempurnaan Penyusunan LAKIP dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2014.

Tujuan penyusunan laporan ini untuk memberikan pertanggungjawaban sekaligus menyampaikan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2016 yang merupakan tahun pertama dari Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015-2019. Dalam LAKIP ini berisi diskripsi dan analisis capaian kinerja Tahun 2016 serta kesimpulan dan rekomendasi untuk perencanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran dan bermanfaat bagi pembuat kebijakan, perencana dan pelaksana program pendidikan dasar dan menengah, serta pihak pemangku kepentingan pendidikan maupun masyarakat umum.

Jakarta,

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah,



Hamid Muhammad, Ph.D
NIP. 195905121983111001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	10
C. Dasar Hukum	10
D. Tujuan dan Sasaran	11
E. Tugas Fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah .	17
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	24
1. Pembinaan Sekolah Dasar	24
2. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.....	26
3. Pembinaan Sekolah Menengah Atas	28
4. Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.....	30
5. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	32
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	34
7. Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan	35
8. Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan.....	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
A. Capaian Kinerja Organisasi	38
1. Pemenuhan Hak Terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas.	41
2. Siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SMLB	48
3. Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SMLB.....	50
4. Indikator Kinerja Program (IKP) 16: Sekolah Menengah di setiap kecamatan pada tahun 2019.....	50
5. Peningkatan Kualitas Pembelajaran	51
6. Jumlah Sekolah Rujukan/Model di setiap Kabupaten/Kota	65
7. Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 standar nasional pendidikan (SNP)	67



8.	Tata Kelola Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Baik.....	67
B.	Pencapaian Program Prioritas.....	68
1.	Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).....	68
2.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	70
3.	Pelaksanaan Kurikulum 2013.....	72
4.	Program Vokasi/Kejuruan.....	75
C.	Pencapaian Kinerja Keuangan.....	78
1.	Pencapaian Kinerja Keuangan.....	78
2.	Analisis Kinerja Keuangan.....	78
BAB IV	PENUTUP.....	80
A.	Simpulan.....	80
B.	Rekomendasi.....	80



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tujuan Strategis Tahun 2015-2019.....	7
Tabel 2: Target Pencapaian Indikator Kinerja Program 2015-2019	17
Tabel 3: Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2016	21
Tabel 4 : Target Kinerja Kegiatan Pembinaan SD tahun 2016.....	25
Tabel 5: Target Kinerja Kegiatan Pembinaan SMP tahun 2016.....	27
Tabel 6: Target Kinerja Kegiatan Pembinaan SMA Tahun 2016	28
Tabel 7: Target Kinerja Kegiatan Pembinaan SMK Tahun 2016	30
Tabel 8: Target Kinerja Kegiatan PKLK Tahun 2016.....	32
Tabel 9: Target Kinerja Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	34
Tabel 10: Target Kinerja Kegiatan LPMP Tahun 2016.....	37
Tabel 11: Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.....	37
Tabel 12: Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.....	38
Tabel 13: Data Pokok Peserta Didik	41
Tabel 14: APM SD/SDLB < 60% Tahun 2016/2017	42
Tabel 15: APK SD/SDLB,75% Tahun 2015/2016	44
Tabel 16: Output Pendukung Pencapaian APM SD/SDLB	45
Tabel 17: APK SMA/SMK/SMLB < 50% Tahun 2016/2017	49
Tabel 18: Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB berakreditasi minimal B.	51
Tabel 19: Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik (pendidikan karakter).	52
Tabel 20: Perolehan medali tertimbang dari kompetisi Internasional.....	54
Tabel 21: SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP.....	56
Tabel 22: SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP.	57
Tabel 23: Sarana dan prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah.....	58
Tabel 24: SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	58
Tabel 25: Indikator Kinerja Program	61
Tabel 26: SM menerapkan program penyalarsan dengan dunia kerja	65
Tabel 27: Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 sekolah menengah rujukan/model	66
Tabel 28: SM yang memenuhi akreditasi minimal B.....	66
Tabel 29: satuan pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya	67
Tabel 30: Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan	68
Tabel 31: Nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (Sangat Baik)	68
Tabel 32: sasaran dan alokasi anggaran serta realisasi pengaluran PIP Tahun 2015.....	69
Tabel 33: sasaran dan alokasi anggaran serta realisasi pengaluran PIP Tahun 2016.....	70
Tabel 34: Alokasi anggaran dana BOS	72
Tabel 35: Sasaran dalam Pelatihan Instruktur Kurikulum 2013	75
Tabel 36: Perbandingan Kebutuhan Tenaga Kerja dengan Lulusan SMK 2016	77
Tabel 37: Perbandingan Realisasi Tahun 2015 dengan 2016	79



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016. Kinerja program pendidikan dasar dan menengah tahun 2016 didukung anggaran sebesar Rp.24.195.504.221.000,- (dikurangi *self-blocking* 1.967.509.200.000) dengan realisasi sebesar Rp.21.840.956.599.329,- (98,26%). Jika dibandingkan dengan target kinerja keuangan sebesar 98,80%, maka kinerja lembaga dalam pengelolaan keuangan adalah sebesar 99,45%.

Sasaran Program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi 8 (delapan) sasaran strategis yang didukung 29 Indikator Kinerja Program (IKP). Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak Terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar Yang Berkualitas;

Keberhasilan sasaran program pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas ditandai oleh peningkatan akses pendidikan pada jenjang SD/SDLB dan SMP/SMPLB. Capaian kinerja dalam meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) SD/SDLB adalah 81,54% dan APK SMP/SMPLB sebesar 93,05%. Capaian kinerja untuk menekan angka putus sekolah SD/SDLB sebesar 0,26% dan SMP/SMPLB adalah 0,50%. Penurunan angka putus sekolah tersebut merupakan salah satu dampak dari Program Indonesia Pintar (PIP) pendidikan dasar dengan sasaran peserta didik sebanyak 15.704.020 siswa. Pencapaian persentase kinerja fisik penyaluran PIP adalah sebesar 105% dan realisasi anggaran sebesar Rp.6.998.980.500.000 (99,68%).

2. Siswa Yang Berpartisipasi Mengikuti Pendidikan SMA/SMK/SMLB

Pada jenjang pendidikan menengah keberhasilan sasaran program untuk meningkatkan APK SMA/SMK/SMLB ditandai oleh pencapaian kinerja program peningkatan APK sebesar 70,47%. Peningkatan APK dari tahun sebelumnya adalah 4,06%. Hal ini tidak mungkin dapat dipenuhi bilamana upaya untuk mendorong lulusan SMP/SMPLB dan lembaga sederajat tidak dilakukan. Pada upaya peningkatan jumlah lulusan SMP/SMPLB dan sederajat persentase capaian kinerja sebesar 96,96%.



3. Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/ SMLB

Keberhasilan program penurunan angka putus sekolah antara lain tercapainya penyaluran PIP kepada peserta didik SMA dan SMK sebanyak 3.497.617 siswa. Dengan demikian persentase kinerja fisik sebesar 90,69%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.781.656.027.485 (99,50%)

4. Sekolah menengah di setiap kecamatan pada tahun 2019

Untuk menjamin ketersediaan layanan pendidikan pada setiap kecamatan di seluruh Indonesia, maka pembangunan unit sekolah baru (USB) Sekolah Menengah diprioritaskan bagi wilayah kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah. Pada tahun 2016 jumlah kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah sebanyak 21,89%. Persentase jumlah kecamatan yang sudah memiliki sekolah menengah adalah 28,11%.

5. Peningkatan kualitas pembelajaran;

Sasaran program peningkatan kualitas pembelajaran adalah mutu lulusan yang memiliki karakter positif dan daya saing regional. Selain itu jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B diharapkan meningkat. Peningkatan kualitas pembelajaran dapat dicapai seiring dengan pencapaian terhadap standard pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar rata-rata nasional adalah untuk tingkat SD 71,18%, dan SMP 70,90%.

6. Jumlah sekolah menengah rujukan/ model di setiap kabupaten dan kota;

Pemerataan kualitas pendidikan pada seluruh kabupaten/kota dilakukan melalui program pembinaan sekolah rujukan dan sekolah model. Setidaknya pada setiap kabupaten/kota terdapat satu satuan pendidikan rujukan (sekolah rujukan) sebagai acuan pengembangan mutu pendidikan sekolah lainnya di kabupaten/kota tersebut. Semua kabupaten/kota telah memiliki sekolah rujukan minimal 1 sekolah untuk setiap jenjang.

7. Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Peningkatan kualitas sekolah sangat dipengaruhi oleh 8 faktor yang merupakan standard nasional pendidikan (SNP). Oleh karena itu upaya pemenuhan SNP telah dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Prioritaas pemenuhan SNP tersebut adalah pada aspek pemenuhan standard sarana dan prasarana. Persentase rata-rata pemenuhan SNP sarana dan prasarana jenjang SD 18%, SMP 25

8. Tata kelola Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang baik.

Peningkatan tata kelola pendidikan dasar dan menengah diupayakan melalui peningkatan fungsi dan kualitas data pokok pendidikan dasar dan menengah sebagai data base perencanaan berbagai program dan kegiatan peningkatan pelayanan pendidikan dasar dan



menengah. Selain itu indikator penilaian LAKIP merupakan kunci keberhasilan dalam pengelolaan program dan anggaran yang memenuhi standard akuntabilita, transparan dan efektif. Hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal menunjukkan hasil yang signifikan yaitu 76,58 secara normatif masuk pada kategori B.



BAB I

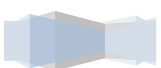
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sektor pendidikan menempati peran strategis dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan itu, di dalam batang tubuh konstitusi di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan mempunyai kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong terwujudnya hasil pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan juga merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk di antaranya untuk mendukung upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memperkuat nilai-nilai budaya. Terkait upaya mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi memainkan peran penting untuk meningkatkan daya saing regional.



Dalam hal ini, pendidikan dituntut untuk mampu melengkapi lulusannya agar memiliki keterampilan teknis (*hard skill*), dan juga kemampuan untuk berpikir analitis, berkomunikasi, serta bekerjasama dalam tim yang secara keseluruhan sering dirangkum sebagai keterampilan lunak (*soft skill*). Di samping itu, pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap jati diri bangsa melalui antara lain pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan pembangunan pendidikan menjadi salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. RPJMN Tahun 2010 – 2014 tersebut disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025. RPJPN Tahun 2005 – 2025 telah dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan, yaitu:

1. Tema pembangunan I (2005-2009) dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi;
2. Tema pembangunan II (2010-2014) dengan fokus pada penguatan pelayanan;
3. Tema pembangunan III (2015-2020) dengan fokus pada penguatan daya saing regional; dan
4. Tema pembangunan IV (2021-2025) dengan fokus pada penguatan daya saing internasional.

Tema pembangunan dan penetapan tahapan tersebut perlu selalu disesuaikan dengan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014 serta perkembangan kondisi yang akan datang. RPJMN Tahun 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMN Tahun 2010-2014 tersebut selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.

Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma dan nilai sebagai berikut:

1. Norma agama dan kemanusiaan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial;
2. Norma persatuan bangsa untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;



3. Norma kerakyatan dan demokrasi untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
4. Nilai-nilai keadilan sosial untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan bias gender serta terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025, visi pembangunan pendidikan 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Makna Insan Indonesia cerdas meliputi 4 Cerdas yaitu Cerdas Spiritual, Cerdas emosional dan sosial, Cerdas Intelektual, dan Cerdas Kinestetis. Makna dari masing-masing kecerdasan tersebut adalah:

1. Cerdas Spiritual bermakna Insan yang mampu beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul;
2. Cerdas emosional dan sosial bermakna Insan yang mampu Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni, nilai-nilai budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial dalam; (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) berdemokrasi; (c) berempati dan bersimpati; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) memupuk rasa ceria dan percaya diri; (f) menghargai kebinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; dan (g) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.
3. Cerdas Intelektual bermakna Insan yang Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Beraktualisasi diri sebagai insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif, dan imajinatif.
4. Cerdas kinestetis bermakna Insan yang Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas. Beraktualisasi insan adiraga.

Sedangkan “Kompetitif” bermakna Insan yang mempunyai sifat dan perilaku; berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan, bersemangat juang tinggi, jujur, mandiri, pantang menyerah, pembangunan dan pembinaan jejaring, bersahabat dengan



perubahan, inovatif dan menjadi agen perubahan, produktif, sadar mutu, berorientasi global, pembelajaran sepanjang hayat, menjadi rahmat bagi semesta alam.

Insan cerdas dan insan kompetitif melandasi penetapan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 sebagaimana tercantum di dalam Rencana Strategis 2015-2019, yaitu ***“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”***. Mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan visi yang akan diemban tersebut, ditetapkanlah Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu ***“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”***

Ada beberapa hal yang harus lebih diperjelas dari visi ini, yakni makna ekosistem dan gotong royong agar tidak menimbulkan beragam tafsir. Ekosistem dimaksud di dalam visi adalah sebagai berikut:

1. Sekolah yang Kondusif. Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan untuk membuat sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah yang kondusif sebagai tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan pelaku lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga menjadi faktor pendukung. Faktor pendukung lain yang penting ialah peran kepala sekolah yang memimpin para pelaku pendidikan menghadapi dan menyelesaikan masalah.
2. Guru sebagai Penyemangat. Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan berkepribadian. Selain itu seorang guru juga harus punya naluri yang sensitif atau peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya. Artinya sensitif terhadap kebutuhan siswa serta mampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar.
3. Orangtua yang Terlibat Aktif. Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya sejak masa sebelum dan sesudah mereka bersekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi, seperti: membentuk kepribadian anak, melaksanakan pendidikan anak di rumah dan mendukung pendidikan di sekolah. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi seluruh anak Indonesia. Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan



anaknya, serta memberikan masukan kepada sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan menciptakan pendidikan yang lebih efektif.

4. Masyarakat yang Sangat Peduli. Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Salah satu alasannya ialah keterbatasan sumber daya pemerintah. Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa menyelenggaraan satuan pendidikan mandiri atau mendukung satuan pendidikan mandiri milik pemerintah. Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan mandiri harus berupaya sebaik-baiknya dan tetap mematuhi semua pedoman, aturan, dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dapat berupa materi, tenaga, dan pikiran. Kini masyarakat dapat berperan serta dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non akademis, dan dalam proses pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan sekolah.
5. Industri yang Berperan Penting. Di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. Bahkan di beberapa negara peran industri menjadi kewajiban sesuai undang-undang yang mengaturnya. Pengalaman negara-negara tersebut dapat menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selain dukungan finansial, peran industri yang penting ialah menyelesaikan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Dunia industri dapat berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen industri dan tempat menambah wawasan dunia kerja bagi siswa. Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang diperlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun program pendidikan bersama.
6. Organisasi Profesi yang Berkontribusi Besar. Organisasi profesi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam penyelenggaraan pendidikan. Organisasi profesi dapat memberikan masukan bahkan menentukan arah kebijakan pendidikan. Pemerintah sudah seharusnya bekerja sama lebih erat dengan organisasi profesi, melalui berbagai jalur komunikasi dan aspirasi. Interaksi yang baik akan menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus mempercepat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan.



7. Pemerintah yang Berperan Optimal. Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 IV (keempat) tahun 2002 yaitu tentang pendidikan, bentuk dukungan pemerintah telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Khusus untuk dukungan pendanaan secara eksplisit dituangkan pada pasal 31 ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional”.

Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada semua jenjang pendidikan serta pemberian beasiswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah dapat terpenuhi. Selain itu pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antar provinsi, kabupaten, dan kota serta antardaerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pemerintah daerah pun dituntut untuk berperan lebih dari pada waktu sebelumnya.

Sebagian besar penggunaan dana pendidikan dari APBN berada dibawah kontrol pemerintah daerah. Pemanfaatan dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan semakin terkoordinasi, antara lain mengkaitkan besaran alokasi dana pemerintah dengan seberapa besar alokasi APBD daerah bersangkutan. Makna gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong diakui sebagai kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan berarti banyak hal yang dilakukan secara bersama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong. Berlandaskan gotong royong akan memposisikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang dicirikan, antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat, dukungan langsung dunia usaha, dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan lembaga satuan pendidikan seperti sekolah.

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan di atas. Dalam rangka mencapai visi ini, ada 4 (empat) misi yang harus diemban oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu:



- a. Mewujudkan Pelaku Pendidikan Dasar dan Menengah yang Kuat (M1)
- b. Meningkatkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan (M2)
- c. Meningkatkan Standar Pendidikan menuju Pendidikan Dasar dan Menengah yang bermutu (M3)
- d. Meningkatkan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik (M4)

Pencapaian tujuan strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sangat ditentukan oleh ketepatan dalam penetapan sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuan strategis tersebut adalah :

Tabel 1: Tujuan Strategis Tahun 2015-2019

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T.1	Penguatan Peran Siswa dalam Ekosistem Pendidikan
T.2	Peningkatan Akses Dikdasmen dan Anak Berkebutuhan Khusus
T.3	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
T.4	Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel

1. Penguatan Peran Siswa dalam Ekosistem Pendidikan.

Penguatan peran siswa ini bertujuan menciptakan posisi siswa sebagai subyek pendidikan. Melibatkan siswa secara teknis akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Siswa jenjang pendidikan dasar atau anak-anak Sekolah Dasar disesuaikan dengan level kemampuan dan karakternya. Pada jenjang pendidikan menengah, pelibatan siswa di kelas secara interaktif diharapkan mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Pada semua jenjang, peningkatan keterlibatan siswa itu antara lain ditandai oleh meningkatnya perilaku positif siswa.

2. Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah dan Anak Berkebutuhan Khusus.

Peningkatan akses di semua jenjang pendidikan telah dilaksanakan selama ini di seluruh wilayah Indonesia. Upaya peningkatan lebih lanjut akan dilakukan, mengingat masih ada ketidakmerataan tingkat akses pendidikan antar provinsi, kabupaten dan kota. Perhatian lebih besar dibanding era sebelumnya akan diberikan



pula pada peningkatan akses pendidikan anak berkebutuhan khusus. Meskipun upaya penuntasan wajib belajar sembilan tahun telah dilaksanakan dan tuntas bagi 66,15% dari keseluruhan kabupaten dan kota (340 dari 514 kabupaten dan kota), peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah untuk memenuhi program wajib belajar dua belas tahun merupakan agenda yang harus dipenuhi dalam lima tahun ke depan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015—2019. Seiring dengan hal ini, fokus peningkatan akses pendidikan dasar ditekankan pada 174 kabupaten dan kota (33,85%) untuk menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun.

Peningkatan jaminan bagi lulusan SMP/MTs untuk dapat melanjutkan ke pendidikan menengah merupakan fokus peningkatan akses pendidikan menengah. Solusi atas kendala biaya dan jarak atau keterjangkauan antara lain melalui pendirian sekolah menengah baru di setiap kecamatan yang dikombinasikan dengan penyediaan biaya operasional pendidikan serta bantuan khusus bagi siswa miskin dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Inovasi dalam penerapan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi diperhatikan untuk mengakselerasi peningkatan akses pendidikan menengah. Fokus peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah dalam lima tahun kedepan juga menitikberatkan pada peningkatan akses bagi anak berkebutuhan khusus, pengembangan daerah 3T, dan memperhatikan aspek gender.

3. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter.

Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran pada semua jenjang pendidikan dalam lima tahun ke depan difokuskan pada pembentukan karakter siswa. Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah didukung oleh semakin banyak pelibatan siswa di kelas secara interaktif, sehingga mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Ditargetkan adanya peningkatan hasil yang signifikan dalam hasil tes nasional dan hasil tes internasional. Sebagai contoh, hasil tes PISA siswa Indonesia meningkat dalam periode lima tahun ke depan. Di samping tes yang demikian itu, mengingat Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, pembentukan karakter bagi siswa menjadi hal yang utama dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan mutu pada pendidikan dasar dan menengah berkaitan erat dengan pengembangan dan penerapan kurikulum secara baik. Evaluasi yang terus-menerus atas pelaksanaan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 diharapkan



menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan diterapkan secara baik. Contoh aspek yang mutlak diperhatikan dalam konteks ini adalah pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan. Pendidikan karakter dimaksudkan untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan mengembangkan kepribadian peserta didik. Sementara itu, pendidikan kewargaan dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah, sehingga terbentuk pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.

4. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel.

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja bertujuan untuk menjaga agar, (a) mutu laporan keuangan tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan (b) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional.

Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan. Partisipasi pemerintah daerah dalam pendidikan akan dicapai melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM ditujukan agar penyediaan sumber daya oleh pendidikan menjadi lebih fokus dan bermutu. Diharapkan semakin banyak daerah yang telah memenuhi SPM pendidikan sehingga penyediaan sumber daya oleh daerah semakin berorientasi pada mutu layanan pendidikan.

Oleh karena itu perlu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah. Penerapan penyediaan anggaran pendidikan melalui APBN yang setiap tahunnya semakin meningkat melalui mekanisme BOS, Program Indonesia Pintar (PIP), anggaran pengembangan sarana prasarana melalui DAK akan diarahkan pada ketersediaan sarana prasarana yang lengkap, baik dan mutu pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM pendidikan.



B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup LAKIP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ini mencakup:

1. Tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Program kerja instansi pemerintah, terutama yang menjadi program atau isu nasional;
3. Aktivitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah.
4. Permasalahan/kendala yang berpengaruh terhadap pencapaian hasil kinerja.

C. Dasar Hukum

Penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar ini menggunakan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.



17. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Penyusunan dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Permendikbud Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Permendikbud Nomor 14 tahun 2015 tentang Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
20. Permendikbud nomor 15 tahun 2015 tentang Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

D. Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Menteri Pendidikan dan masyarakat selama tahun 2016;
2. Menyampaikan informasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dasar tahun 2016 kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan;
3. Menjadi dokumen atau alat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2016.

Sasaran penyusunan LAKIP seperti disebutkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja yang akan menjadi prasyarat bagi terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Dalam Instruksi Presiden tersebut lebih lanjut dijelaskan bahwa sasaran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, yakni instansi pemerintah yang beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya secara operasional;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.



E. Tugas Fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah

1. Struktur Organisasi

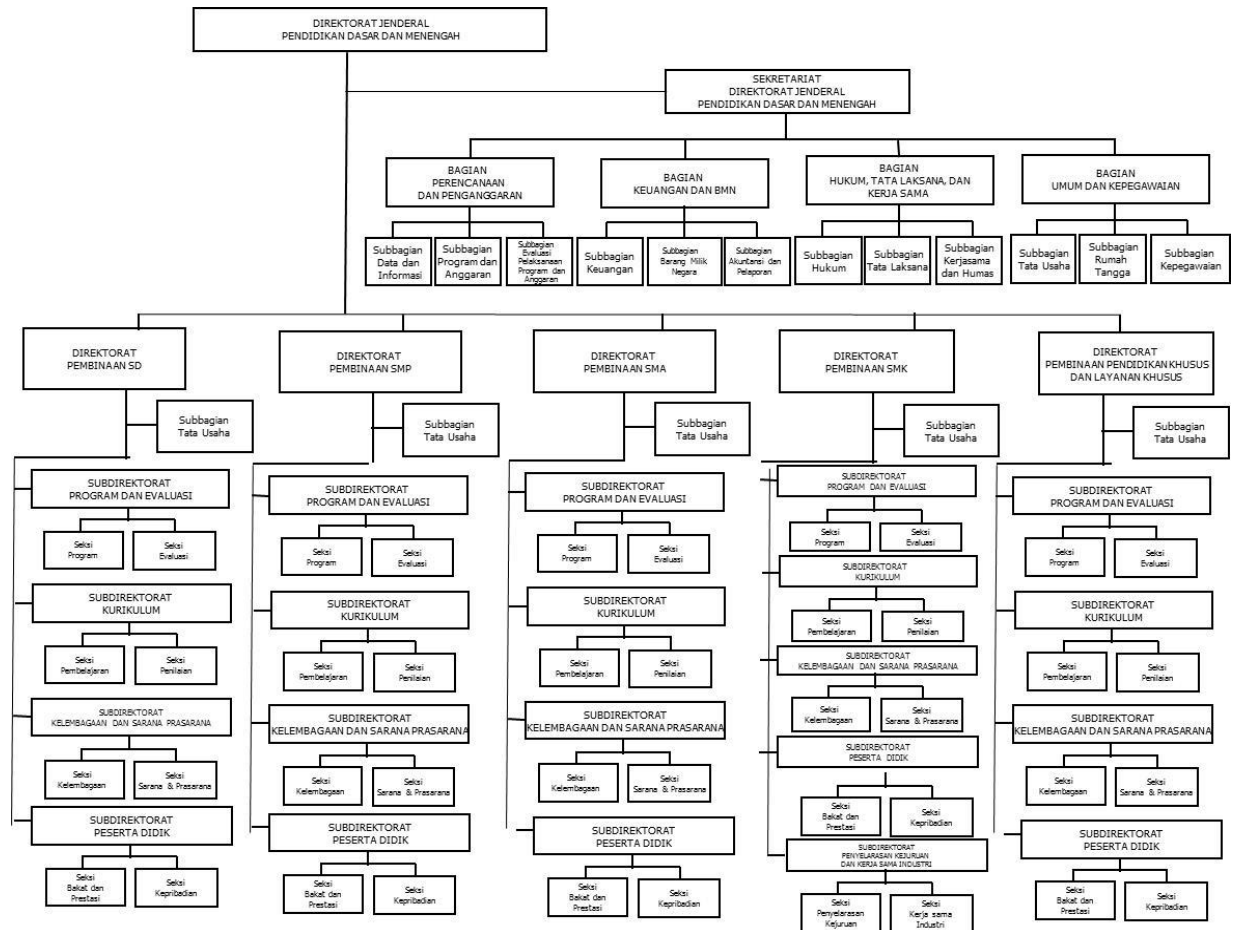
Kerangka kelembagaan adalah perangkat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain, 1) meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJMN sesuai dengan fungsi dan visi/misi Kemendikbud; 2) membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah dalam melaksanakan program-programnya; dan 3) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Pada periode pembangunan 2015—2019, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah akan melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2015—2019 ditunjukkan pada gambar berikut:

Bagan 1 Struktur Organisasi Ditjen Dikdasmen



2. Tugas dan Fungsi

Memperhatikan kemajuan dan potensi Indonesia, ADB dalam laporannya yang berjudul *Asia 2050: Realizing Asian Century* memperkirakan Indonesia akan menjadi 7 (tujuh) kekuatan ekonomi utama di Asia bersama China, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand. Dalam laporannya yang terakhir, Bank Dunia memasukkan Indonesia dalam ajaran 10 (sepuluh) besar perekonomian dunia.

Kemajuan yang dicapai tersebut tidak terlepas dari keberhasilan membangun kelembagaan yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik di berbagai bidang secara konsisten. Upaya membangun kelembagaan pemerintah yang efektif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan terus dilanjutkan selama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Perkuatan kelembagaan yang dilakukan selama



KIB II, antara lain: (1) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebagai upaya menangani persoalan terorisme; (2) Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), sebagai langkah strategis untuk mengelola perbatasan dalam rangka memperkuat ketahanan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan; (3) Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) sebagai upaya untuk mengatasi ketertinggalan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (4) Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagai upaya untuk mengurai berbagai sumbatan-sumbatan (*bottle-neck*) dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaannya; (5) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) guna menyelaraskan dan mengakselerasi upaya pemerintah dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan.

Di tengah prestasi tersebut, upaya penguatan kelembagaan masih perlu terus dilanjutkan. Indonesia diyakini masih tumbuh di bawah potensi yang dimiliki karena berbagai permasalahan, antara lain rendahnya kapasitas kelembagaan publik. Laporan dari Bank Dunia berjudul “*Investing in Indonesia’s Institutions*” menyebutkan bahwa problem utama di Indonesia bukanlah masalah pembiayaan semata, tetapi “*lack of effective and accountable institutions that can translate available resources into better development outcomes*”. Menyadari situasi ini, pemerintah selalu memberi perhatian terhadap upaya membangun kapasitas kelembagaan pemerintah agar mampu melaksanakan program dan kegiatan pembangunan guna mencapai kinerja yang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Upaya penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah akan dilanjutkan di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2015-2019. Sebagai pelaksanaan RPJMN 2015-2019, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 penguatan kapasitas kelembagaan memiliki arti yang sangat strategis mengingat kapasitas kelembagaan yang tinggi akan menjadi pondasi yang kokoh bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dengan efektif, efisien, dan akuntabel guna tercapainya sasaran pembangunan pendidikan nasional.

Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah menjadi makin efektif dan akuntabel akan dilakukan dengan mewujudkan lembaga-lembaga pemerintah yang berkualitas, yang ditandai dengan: (1) fungsi yang jelas, kewenangan yang tepat, serta struktur organisasi yang efektif dan efisien sehingga terhindar dari adanya



duplikasi fungsi dan benturan kewenangan; (2) aturan main dan tata hubungan kerja yang efektif, efisien, transparan dan sinergis (*interconnected governance system*); dan (3) profesionalitas dan integritas aparatur sipil negara yang tinggi sehingga mampu melaksanakan visi, misi, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis lembaganya.

Penataan kelembagaan dilakukan dengan koordinasi yang intensif dan efektif di antara berbagai instansi yang terkait dengan penataan kelembagaan pemerintah dengan memperhatikan: (1) kebijakan pembangunan; (2) peraturan-perundangan yang berlaku, termasuk sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; (3) prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern; serta (4) transparansi, efektivitas, dan efisiensi sesuai ketersediaan anggaran negara. Pembentukan lembaga baru bersifat sangat selektif dan hanya untuk hal-hal yang sangat penting dan mendesak. Dari berbagai upaya tersebut diharapkan dapat terwujud kerangka kelembagaan yang efektif dan akuntabel, yang dapat melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu melalui:

- (1) Pembentukan lembaga independen untuk merumuskan dan melaksanakan sistem penilaian pendidikan
- (2) Peningkatan peran teknologi informasi (TI) dalam pendidikan termasuk dalam pengembangan ilmu TI, penyediaan materi bahan ajar, penguatan metode pembelajaran yang efektif dan penguatan pengelolaan pendidikan
- (3) Pembentukan dewan pendidikan di tingkat provinsi.
- (4) Pembentukan lembaga independen untuk melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi berbagai program prioritas nasional.
- (5) Meningkatkan sinergi kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan di pusat dan daerah melalui pembagian urusan.
- (6) Memperkuat sistem informasi pendidikan di semua tingkatan pemerintahan.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 346, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- (1) Perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan dasar dan menengah;



- (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, fasilitasi sumberdaya, pemberian izin dan kerja sama penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan Negara asing atau lembaga asing, penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus dan daerah tertinggal (pendidikan layanan khusus), dan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah;
- (3) Fasilitasi pembangunan *teaching factory* dan *technopark* di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan;
- (4) Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan dasar dan menengah;
- (5) Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pendidikan dasar dan menengah;
- (6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dasar dan menengah;
- (7) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
- (8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut secara teknis dilakukan oleh lembaga unit eselon II dibawahnya yang terdiri atas:

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- (2) Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
- (3) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- (4) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- (5) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
- (6) Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

Sementara itu pelaksanaan fungsi lain yaitu dalam rangka Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah secara teknis dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT)/ LPMP yang berada di seluruh provinsi kecuali Provinsi Kalimantan Utara.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Untuk menjamin tercapainya Tujuan Strategis yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran program yang dapat memberikan kontribusi nyata dan terukur. Oleh karena itu, setiap sasaran program yang mendukung tercapainya tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja program (IKP). Adapun sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2: Target Pencapaian Indikator Kinerja Program 2015-2019

Kode	Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target		
			2015	2016	2017	2018	2019
06 - PROGRAM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH							
SP -01	Pemenuhan Hak Terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar Yang Berkualitas						
IKP1	APM SD/SDLB	%	81,94	81,54	82,88	84,52	85,20
IKP2	APK SD/SDLB	%	96,24	93,05	98,02	99,92	100,55
IKP3	Angka Putus Sekolah SD	%	0,67	0,26	1,00	0,98	0,97
IKP4	APM SMP/SMPLB	%	61,45	74,63	73,07	73,70	73,72
IKP5	APK SMP/SMPLB	%	76,15	75,77	82,40	83,61	83,77
IKP6	Angka Putus Sekolah SMP	%	0,87	0,50	1,08	1,03	1,01
IKP7	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP	%	78,40	81,68	84,95	86,89	87,67
IKP8	Jumlah siswa jenjang pendidikan dasar penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar	Siswa	10.815.709	15.704.020	15.380.582	15.380.582	15.380.582
IKP9	Rasio APM perempuan:laki-laki di SD	%	100	100	100	100	100
IKP10	Rasio APM perempuan:laki-laki di SMP	%	100	103	100	100	100



Kode	Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target		
			2015	2016	2017	2018	2019
SP -02	Siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SMLB/Paket C						
IKP11	APK SMA/SMK/SMLB	%	66,41	70,47	82,15	84,09	85,71
IKP12	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK	%	96,90	96,96	84,00	86,00	88,00
IKP13	Rasio APK perempuan:laki-laki di SMA/SMK	%	100	100	100	100	100
SP -03	Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SMLB/ Paket C						
IKP14	Jumlah siswa jenjang pendidikan menengah penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar	Siswa	3.550.863	3.497.617	3.856.899	3.856.979	3.858.211
IKP15	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	1,81	1,33	1,00	0,90	0,80
SP -04	Sekolah Menengah di setiap kecamatan pada tahun 2019						
IKP16	Persentase kecamatan yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah	%	84,74	78,11	88,30	94,20	100
SP -05	Peningkatan Kualitas Pembelajaran						
IKP17	Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang dipersiapkan berakreditasi minimal B	Sek	3,331		15.300	15.300	15.300
IKP18	Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik(pendidikan karakter)	Nilai Sikap	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
IKP19	Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah	Medali Tertimbang	308	151	152	160	168
IKP20	Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	%	18,00	18,00	24,00	32,00	40,00
IKP21	Persentase SMP yang memiliki	%	25,00	25,00	37,00	45,00	53,00



Kode	Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target		
			2015	2016	2017	2018	2019
	sarana dan prasarana sesuai SNP						
IKP22	Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	63,36	70,10	61,35	61,46	61,49
IKP23	Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	76,62	70,90	75,13	75,25	75,37
IKP24	SM menerapkan program penyalarsan dengan dunia kerja	%	7,7	15,0	45,00	60,00	75,00
SP -06	Jumlah Sekolah Menengah Rujukan/Model di setiap Kabupaten/Kota						
IKP25	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah Rujukan/Model	%	41,63	100	70,50	90,00	100
IKP26	Persentase SM yang memenuhi akreditasi minimal B	%	86	86	75	80	85
SP-07	Meningkatnya kualitas satuan Pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)						
IKP27	Persentase Satuan Pendidikan yang meningkat indeks efektifitasnya berdasarkan SNP	%	14	29	52	76	95
SP-08	Tata kelola Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang baik						
IKP28	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan	%	85	87	89	92	95
IKP29	Nilai Minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (sangat baik) pada tahun 2019	%	71,09	76,58	75	78	80

1. Penguatan Peran Siswa dalam Ekosistem Pendidikan.

Untuk meningkatkan peran siswa dalam ekosistem pendidikan diperlukan indikator perilaku siswa yang spesifik dan terukur. *Indikator keberhasilan sasaran program ini adalah Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMK/SMLB adalah “Baik”*



Melalui program ini diharapkan siswa dapat mewujudkan pemahaman mengenai pluralitas dan keragaman sosial dan budaya dalam masyarakat yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman; terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air; terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

2. Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Anak Berkebutuhan Khusus.

Untuk meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah dan akses anak berkebutuhan khusus dilakukan upaya dengan mengoptimalkan program wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Indikator Kinerja Program (IKP) untuk pemenuhan hak terhadap pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas adalah :

- a. Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia sekolah pada pendidikan SD dan SMP.
- b. Meningkatnya angka melanjutkan ke SMP/MTs;
- c. Menurunnya kesenjangan antarkelompok masyarakat:
- d. Meningkatnya siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SMLB
- e. Menurunnya persentase angka putus sekolah dan tidak terjadi drop out SMA/SMK/SMLB
- f. Tersedianya SMA/SMK di setiap kecamatan pada tahun 2019

3. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter.

Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan pemenuhan terhadap Standar Nasional Pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan



pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovatif. Untuk mencapai tujuan strategis ini ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:

- a. Tersedianya sekolah menengah rujukan di setiap kabupaten/kota .
- b. Meningkatnya kualitas satuan pendidikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan (SNP).

4. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel

Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien. *Performace* atau kinerja pengelola kegiatan menjadi sangat penting bagi terciptanya tata kelola yang diinginkan tersebut. Selain perlunya kinerja yang baik, maka ketercapaian tujuan strategis ini harus didukung oleh Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:

- a. Tersedianya data pendidikan dasar dan menengah yang akurat, berkelanjutan dan terbaru.
- b. Nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (sangat baik) pada tahun 2015-2019.

Sasaran Program tersebut memberikan arah dalam mencapai tujuan strategis melalui program dan kegiatan yang menunjang tercapainya Indikator Kinerja Program (IKP). Perjanjian Kinerja merupakan komitmen pimpinan lembaga yang harus dipenuhi sesuai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3: Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2016

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar	APM SD/SDLB	82.51 %
		APK SD/SDLB	97.85 %



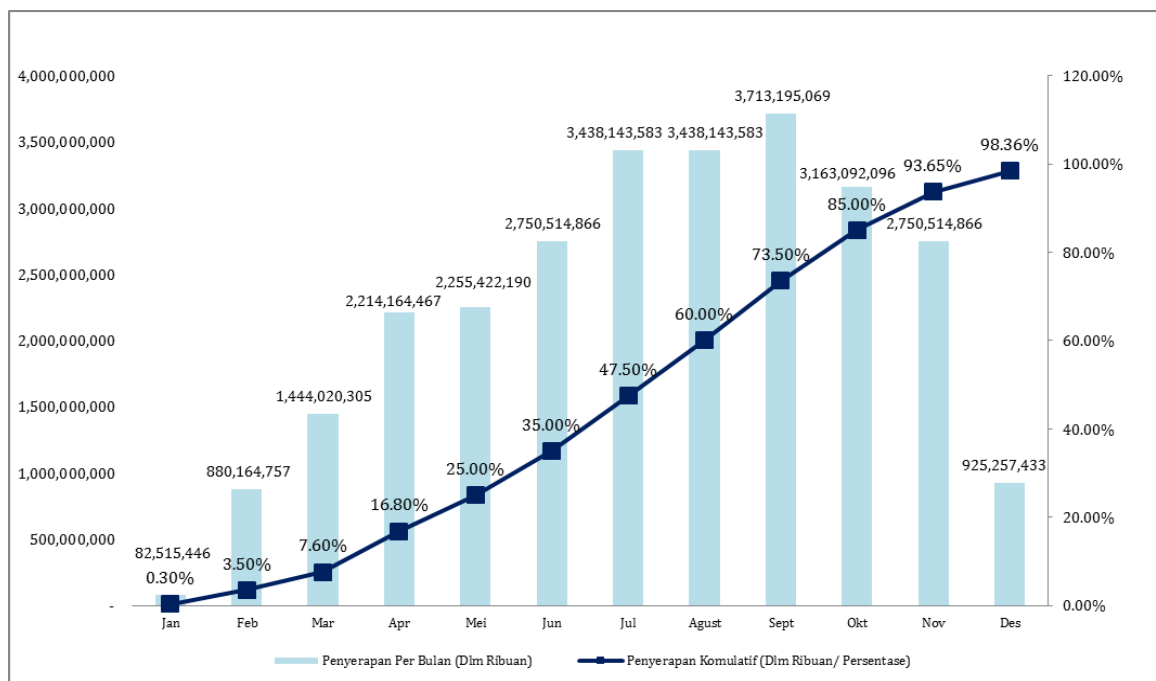
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
	yang berkualitas	Angka Putus Sekolah SD	1.04 %
		APM SMP/SMPLB	72.69 %
		APK SMP/SMPLB	81.89 %
		Angka Putus Sekolah SMP	1.11 %
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP	83.64 %
		Jumlah siswa jenjang pendidikan dasar penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)	15,380,582 siswa
		Rasio APM perempuan:laki-laki di SD	100 %
		Rasio APM perempuan:laki-laki di SMP	100 %
2.	Siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SMLB	APK SMA/SMK/SMLB	79.31 %
		Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK	82.00 %
		Rasio APK perempuan:laki-laki di SMA/SMK	100 %
3.	Persentase angka putus sekolah SMA/SMK/ SMLB	Jumlah siswa jenjang pendidikan menengah penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)	3,856,676 siswa
		Angka putus sekolah SMA/SMK	1.10 %
4.	Sekolah menengah di setiap kecamatan pada tahun 2019	Persentase kecamatan yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah	82,5%
5.	Peningkatan kualitas pembelajaran	Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang dipersiapkan berakreditasi minimal B	15,300 sekolah
		Persentase SM yang memenuhi akreditasi minimal B	Baik
		Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik (pendidikan karakter)	148
		Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah	17.00 %



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
		Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	29.00 %
		Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	61.24 %
		Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	75.01 %
		Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	30.0 %
		SM menerapkan program penyesuaian dengan dunia kerja	49.9 %
6.	Jumlah sekolah menengah rujukan/model di setiap kabupaten dan kota	Persentase kabupaten dan kota yang memiliki minimal 1 sekolah menengah rujukan/model	70 %
7.	Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya berdasarkan SNP	29%
8.	Tata kelola Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang baik	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan	87%
		Nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (baik) pada tahun 2019	73



Bagan 2: Target Kinerja Keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2016



B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan bagian dari rencana aksi pelaksanaan program pendidikan dasar dan menengah. Rencana aksi tersebut meliputi kegiatan pada 6 (enam) satuan kerja pusat, 34 satuan kerja dekonsentrasi pada tingkat provinsi, dan 33 LPMP sebagai unit pelaksana teknis. Kegiatan pada tingkat satuan kerja merupakan target indikator kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2016. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Sekolah Dasar

Prioritas pembinaan sekolah dasar adalah untuk meningkatkan daya tampung SD sehingga dapat meningkatkan APK dan menekan angka putus sekolah. Selain itu, upaya peningkatan mutu layanan pendidikan dilakukan untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM), pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan amanat UU tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan mendorong peningkatan lulusan SD untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.



Tabel 4 : Target Kinerja Kegiatan Pembinaan SD tahun 2016

No	Output Pendukung	Satuan	Target		Alokasi Anggaran
			Perjanjian Kinerja	DIPA	
1.	Siswa yang mendapatkan program gizi anak sekolah (PROGAS)	Siswa	32,523	38,448	60,264,639,000
2.	Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	Siswa	2,435	2,717	7,480,229,000
3.	Ruang Kelas Baru yang dibangun	Ruang	2,215	1,650	259,807,830,000
4.	Ruang Belajar yang direhabilitasi	Ruang	5,875	6,114	556,824,800,000
5.	Siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade	Siswa	3,695	3,695	53,529,059,000
6.	Sekolah yang mendapatkan Program Peningkatan Mutu Pembelajaran	Sekolah	500	500	12,926,979,000
7.	Sekolah yang mendapatkan standardisasi dan akreditasi	Sekolah	1,491	6,631	31,967,156,000
8.	Sekolah yang mendapatkan perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB)	Sekolah	1,320	893	140,811,759,000
9.	Siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	Siswa	10,360,614	10,360,614	4,376,475,396,000
10.	Sekolah yang mendapatkan pembinaan ekstrakurikuler	Sekolah	4,965	4,965	34,059,711,000
11.	Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Sekolah	25,542	25,542	2,372,954,000
12.	Unit Sekolah Baru yang dibangun	Unit	20	24	40,311,101,000
13.	Sekolah yang melaksanakan	Sekolah	32,122	32,122	49,453,065,000



No	Output Pendukung	Satuan	Target		Alokasi Anggaran
			Perjanjian Kinerja	DIPA	
	Kurikulum 2013				
14.	Sekolah yang mendapatkan Peralatan Pendidikan	Sekolah	4,000	3,702	206,551,275,000
15.	Layanan pengelolaan BOS dan DAK	Prov/kab/Kota	531	531	19,275,537,000
16.	Kerjasama dan sinergi antar lembaga	Sekolah	514	514	31,813,790,000
17.	Sekolah yang direvitalisasi	Sekolah	245	129	127,826,706,000
18.	Sekolah Rujukan	Sekolah	5,140	5,140	29,293,440,000
Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis lainnya					
19.	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	-	28	12,272,374,000
20.	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	-	7	9,153,820,000
21.	Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	-	12	32,240,620,000
22.	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Unit	-	150	1,340,000,000

2. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Prioritas pembinaan sekolah menengah pertama adalah untuk meningkatkan daya tampung SMP sehingga dapat meningkatkan APK dan menekan angka putus sekolah. Selain itu, upaya peningkatan mutu layanan pendidikan dilakukan untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM), pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan amanat UU tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan mendorong peningkatan lulusan SMP untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk memenuhi sasaran tersebut Direktorat Jenderal telah menyusun tahapan pelaksanaan kegiatan dan anggaran 2015-2019 sebagai berikut:



Tabel 5: Target Kinerja Kegiatan Pembinaan SMP tahun 2016

No	Output Pendukung	Satuan	Target		Alokasi Anggaran
			PK	DIPA	
1.	Sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013	Sekolah	9,000	10,273	62,784,931,000
2.	Unit Sekolah Baru yang dibangun	Unit	196	196	486,398,884,000
3.	Ruang Kelas Baru yang dibangun	Ruang	3,486	2,807	487,225,491,000
4.	Ruang Belajar yang direhabilitasi	Paket	3,000	5,328	309,817,540,000
5.	Sekolah yang mendapatkan Ruang Laboratorium/Praktik Siswa	Ruang	788	562	182,053,098,000
6.	Sekolah yang mendapatkan perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB)	Ruang	850	564	162,536,309,000
7.	Layanan SMP Terbuka	Sekolah	400	964	74,839,479,000
8.	Siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade	Orang	6,456	4,414	77,458,736,000
9.	Sekolah yang mendapatkan pembinaan ekstrakurikuler	Sekolah	5,272	852	17,173,394,000
10.	Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Siswa	4,369,968	4,796,731	2,802,503,785,000
11.	Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	Siswa	10,752	2,976	30,567,010,000
12.	Layanan Pendidikan Di Daerah 3T dan Cluster 4	Sekolah	-	270	9,674,850,000
13.	Sekolah Berasrama yang dibangun	Unit	19	25	69,415,500,000
14.	SD-SMP Satu Atap yang dibangun	Unit	110	109	128,662,939,000
15.	Sekolah yang mendapatkan bantuan peralatan pendidikan	Paket	2,362	1,305	263,464,609,000
16.	Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Paket	699	252	25,431,345,000
17.	Sekolah yang mendapatkan Program Peningkatan Mutu Pembelajaran	Sekolah	-	2,586	19,987,490,000
18.	Sekolah yang mendapatkan ruang penunjang lainnya	Ruang	270	155	31,264,855,000
19.	Sekolah Rujukan	Sekolah	-	514	45,120,710,000
20.	Layanan Mutu SD-SMP Satu Atap	Sekolah	-	407	40,548,050,000
21.	Sekolah yang direvitalisasi	Sekolah	-	36	43,727,495,000
Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis lainnya					



No	Output Pendukung	Satuan	Target		Alokasi Anggaran
			PK	DIPA	
22.	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	-	13	19,681,365,000
23.	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	Laporan	-	1	12,801,954,000
24.	Kerjasama dan sinergi antar lembaga	Paket	-	-	3,052,100,000
25.	Layanan pengelolaan BOS dan DAK	Kab/Kota	-	554	23,546,323,000
26.	Dokumen Barang Milik Negara	Laporan	-	1	1,148,750,000
27.	Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	-	12	22,348,581,000
28.	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	-	47	731,500,000
29.	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Unit	-	2	255,000,000
30.	Gedung/Bangunan	M2		160	3,170,000,000

3. Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Prioritas pembinaan sekolah menengah atas adalah untuk meningkatkan daya tampung SMA sehingga dapat meningkatkan APK dan menekan angka putus sekolah. Selain itu, upaya peningkatan mutu layanan pendidikan dilakukan untuk memenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan amanat PP tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan mendorong peningkatan lulusan SMP/MTs untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk memenuhi sasaran tersebut Direktorat Jenderal telah menyusun tahapan pelaksanaan kegiatan dan anggaran 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 6: Target Kinerja Kegiatan Pembinaan SMA Tahun 2016

No	Output Pendukung	Satuan	Target		Alokasi Anggaran
			PK	DIPA	
1.	Unit Sekolah Baru yang dibangun	Unit	222	200	475,508,072,000
2.	Ruang Kelas Baru yang dibangun	Ruang	4,000	4,000	818,391,196,000



No	Output Pendukung	Satuan	Target		Alokasi Anggaran
			PK	DIPA	
3.	Sekolah yang mendapatkan Ruang Laboratorium/Praktik Siswa	Ruang	4,382	1,519	313,949,238,000
4.	Ruang Belajar yang direhabilitasi	Ruang	1,810	1,600	83,292,690,000
5.	Sekolah Rujukan	Paket	675	818	194,449,780,000
6.	Sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan	paket	3,400	2,206	204,350,335,000
7.	Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa	Sekolah	749	443	21,992,392,000
8.	Siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	Siswa	1,367,559	1,367,560	1,282,204,672,000
9.	Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	Siswa	2,942	3,346	12,200,640,000
10.	Siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade	Bidang	3,094	35	56,299,658,000
11.	Sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013	Sekolah	7,564	10,335	137,472,010,000
12.	Sekolah yang direvitalisasi	Sekolah		339	131,499,617,000
13.	Sekolah yang mendapatkan standardisasi dan akreditasi	sekolah	100	100	8,360,485,000
14.	Sekolah yang mendapatkan perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB)	Ruang	-	316	78,666,040,000
15.	Sekolah yang mendapatkan pembinaan ekstrakurikuler	Sekolah	-	9	46,373,309,000
Jumlah dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pengendalian kegiatan bidang Pendidikan SMA serta koordinasi lintas sektoral bidang pendidikan SMA					
16.	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	-	23	25,546,095,000
17.	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	-	5	8,226,806,000
18.	Program Pengembangan Kelembagaan	Dokumen	-	14	2,760,840,000
19.	Layanan Perkantoran	Bulan layanan	-	12	22,884,144,000
20.	Layanan pengelolaan BOS dan DAK	Dokumen	-	7	5,776,692,000
Jumlah kerjasama dan kemitraan institusi/instansi dalam dan luar negeri					
21.	Kerja sama dan sinergi antar Lembaga	dokumen	-	1	3,851,151,000



No	Output Pendukung	Satuan	Target		Alokasi Anggaran
			PK	DIPA	
Jumlah layanan Sistem Pendataan dan Informasi Pendidikan SMA					
22.	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	-	95	3,820,443,000
23.	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Unit	-	13	882,424,000

4. Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Prioritas pembinaan sekolah menengah kejuruan adalah untuk meningkatkan daya tampung SMK sehingga dapat meningkatkan APK dan menekan angka putus sekolah. Selain itu, upaya peningkatan mutu lulusan SMK melalui pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan amanat UU tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan mendorong tumbuhnya SMK dengan spesialisasi/keahlian khusus sehingga terdapat perbedaan kompetensi yang signifikan antara lulusan sekolah kejuruan dan sekolah menengah atas dari aspek kesiapan memasuki dunia kerja. Dengan demikian tidak ada lagi lulusan SMK yang tidak diserap dunia kerja. Oleh karena itu secara khusus kegiatan pembinaan SMK mengutamakan peningkatan pembelajaran dengan peralatan dan teknologi tercanggih. Untuk memenuhi sasaran tersebut Direktorat Jenderal telah menyusun tahapan pelaksanaan kegiatan dan anggaran 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 7: Target Kinerja Kegiatan Pembinaan SMK Tahun 2016

No	Output Pendukung	Satuan	Target		Alokasi Anggaran
			PK	DIPA	
1.	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	15	11	9,020,851,000
2.	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	5	5	2,645,490,000
3.	Dokumen Layanan Informasi Kebijakan	Dokumen	34	34	26,947,187,000
4.	Kerjasama dan sinergi antar lembaga	Institusi	29	30	28,671,537,000
5.	Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	Siswa	19,655	28,656	50,393,675,000



No	Output Pendukung	Satuan	Target		Alokasi Anggaran
			PK	DIPA	
6.	Sekolah Rujukan	Sekolah	111	156	255,180,736,000
7.	Unit Sekolah Baru yang Dibangun	Sekolah	341	221	614,069,625,000
8.	Ruang Kelas Baru yang dibangun	Ruang	5,962	5,663	1,202,050,747,000
9.	Sekolah yang mendapatkan Ruang Laboratorium/Praktik Siswa	Ruang	2,036	2,036	524,881,234,000
10.	Sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan	Sekolah	2,786	2,574	347,799,215,000
11.	Siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	Siswa	1,829,167	1,829,167	1,397,438,412,000
12.	Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa	Sekolah	4,346	5,480	20,261,116,000
13.	Sekolah yang Menerapkan Kurikulum 2013	Sekolah	2,500	2,500	46,735,742,000
14.	Ruang Belajar yang direhabilitasi	Ruang	1,000	999	52,423,883,000
15.	SMK Berbasis Pesantren/Komunitas	Sekolah	90	100	75,321,586,000
16.	SMK Kelautan Pendukung Kemaritiman	Sekolah	118	168	212,355,295,000
17.	SMK Pertanian Pendukung Ketahanan Pangan	Sekolah	30	32	32,408,600,000
18.	SMK di Papua/Papua Barat/ Daerah Khusus/ 3T	Sekolah	46	54	48,291,156,000
19.	SMK yang Melakukan Penyelarasan Kejuruan	Sekolah	1,695	1,695	18,582,640,000
20.	Siswa yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Siswa	2,300	2,350	74,725,177,000
21.	SMK yang Melaksanakan Teaching Factory/Technopark	Sekolah	54	62	34,613,639,000
22.	Sekolah yang Mendapatkan Standardisasi dan Akreditasi	Sekolah	1,360	1,360	21,537,869,000
23.	Sekolah yang Mendapatkan Perpustakaan/Pusat Sumber Belajar	Sekolah	1,900	327	81,646,796,000
24.	SMK yang bekerjasama dengan Industri	Sekolah	1,050	688	48,609,917,000
25.	Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	17	12	31,365,594,000
26.	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Unit	6	6	3,815,710,000



5. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan

Khusus

Prioritas Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus adalah untuk meningkatkan daya tampung SDLB, SMPLB, SMLB, dan program pelayanan khusus lainnya. Sehingga dapat meningkatkan APK dan menekan angka putus sekolah. Selain itu, upaya peningkatan mutu layanan pendidikan dilakukan melalui pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan amanat PP tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan mendorong peningkatan lulusan SDLB, SMPLB dan SMLB melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk memenuhi sasaran tersebut Direktorat Jenderal telah menyusun tahapan pelaksanaan kegiatan dan anggaran 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 8: Target Kinerja Kegiatan PKLK Tahun 2016

No	Output Pendukung	Satuan	Target		Alokasi Anggaran
			PK	DIPA	
1.	Kerjasama dan Sinergi Antar Lembaga	Lembaga		146	14,544,271,000
2.	Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum 2013	Sekolah	1,650	1,650	82,746,982,000
3.	Ruang Belajar Yang Direhabilitasi	Ruang	275	275	14,504,988,000
4.	Unit Sekolah Baru Yang Dibangun	Unit	31	33	85,905,038,000
5.	Ruang Kelas Baru Yang Dibangun	Ruang	215	215	24,935,467,000
6.	Sekolah Yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan	Paket	295	295	42,373,930,000
7.	Sekolah yang direvitalisasi	Sekolah	-	8	6,316,335,000
8.	Layanan Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN)	Sekolah	-	14	784,000,000
9.	Sekolah Yang Mendapatkan Perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB)	Unit	104	50	12,282,831,000
10.	Asrama Siswa yang dibangun	Unit	7	2	2,800,630,000
11.	Sekolah Yang Mendapatkan Ruang Penunjang Lainnya	Ruang	20	15	5,385,825,000
12.	Sekolah Yang Menerima Bantuan Operasional PKLK	Sekolah	2,324	2,452	75,709,755,000
13.	Layanan Daerah Bencana Alam/Sosial	Sekolah/ Lembaga	160	150	14,790,688,000



No	Output Pendukung	Satuan	Target		Alokasi Anggaran
			PK	DIPA	
14.	Siswa/Anak Berkebutuhan Khusus Penerima Bantuan	Siswa	100,982	117,064	175,451,470,000
15.	Layanan Pendidikan Inklusif	Prov/Kab/Kota	40	40	23,292,687,000
16.	Sekolah yang mendapatkan pembinaan ekstrakurikuler	Sekolah	102	102	3,169,017,000
17.	Sekolah Yang Mendapatkan Standarisasi dan Akreditasi	Sekolah/Lembaga	17	17	1,042,340,000
18.	Sekolah Yang Mendapatkan Program Peningkatan Mutu Pembelajaran	Sekolah	-	600	7,506,686,000
19.	Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival dan Olimpiade	Orang	1,348	1,348	35,466,216,000
20.	Sekolah Yang Mendapatkan Ruang Laboratorium/Praktik Siswa	Unit	-	50	7,170,025,000
21.	Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa	Sekolah	167	138	14,430,096,000
22.	Siswa Penerima Program Pendidikan Layanan Khusus	Siswa	2,900	2,401	44,750,394,000
23.	Jumlah SMLB/SM Inklusi/SM Cibi/SM Keberbakatan penerima BOS SM	Sekolah	2,075	-	6,480,000
24.	Jumlah Pusat Pengembangan PKLK yang dibangun	Unit	3	-	39,849,945
25.	Jumlah sentra/sub sentra/SLB Pembina yang direhabilitasi	Unit	510	-	29,857,335
26.	Jumlah Sekolah Terbuka, Sekolah berasrama, Sekolah Terintegrasi dan/ atau Sekolah Darurat	Sekolah	22	-	9,337,481
27.	Jumlah kab./kota yang mendapat dukungan bidang pendidikan menengah terhadap kawasan -kawan khusus dan strategis	Kab/kota	14	-	37,729,668
28.	Jumlah Layanan Pendidikan Menengah di daerah Khusus	Layanan	2	-	24,282,794
29.	Jumlah anak berkebutuhan khusus	Siswa	8,661	-	17,668,440
30.	Jumlah SDLB/SMPLB yang mendapatkan pembinaan akreditasi menuju SPM/SSN	Sekolah	17	-	10,829,552
Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis lainnya					
31.	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	-	8	5,239,187,000



No	Output Pendukung	Satuan	Target		Alokasi Anggaran
			PK	DIPA	
32.	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	-	6	3,510,287,000
33.	Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	-	12	29,120,892,000
34.	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	-	8	336,000,000
35.	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Unit	-	139	2,242,680,000

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya

Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya merupakan menitikberatkan pada upaya meningkatkan pelayanan publik, mendorong peningkatan mutu pendidikan, mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran pendidikan oleh daerah, menjamin akuntabilitas kinerja program dan anggaran, memperkuat manajemen kinerja pembangunan dan manajemen aparatur sipil negara.

Tabel 9: Target Kinerja Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

No	Output Pendukung	Satuan	Target	Alokasi Anggaran
1.	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	18	16,998,000,000
2.	Data Pendidikan Dasar dan Menengah	Dokumen	33	35,208,794,000
3.	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	Laporan	30	14,266,460,000
4.	Laporan Pelaksanaan Lomba, Festival, Olimpiade	Laporan	6	19,646,528,000
5.	Dokumen Keuangan	Dokumen	25	17,000,000,000
6.	Laporan Keuangan	Laporan	6	12,923,250,000
7.	Naskah Hukum Pendidikan Dasar dan Menengah	Naskah	18	9,500,000,000
8.	Layanan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	Layanan	25	18,578,750,000
9.	Pegawai yang Kompetensi / Kualifikasinya Meningkatkan	Orang	6,420	20,039,730,000
10.	Dokumen Barang Milik Negara	Laporan	18	17,955,637,000
11.	Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa	Sekolah	450	22,000,000,000
12.	Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang Terbina	Lembaga	280	8,875,570,000



No	Output Pendukung	Satuan	Target	Alokasi Anggaran
13.	Naskah Ketatalaksanaan	Naskah	30	10,000,000,000
14.	Layanan Pengelolaan BOS dan DAK	Dokumen	33	6,762,500,000
15.	Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	49,000,000,000
16.	Gedung/Bangunan	M2	1,300	3,073,523,000
17.	Naskah pemetaan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Dokumen	18	17,384,040,000

7. Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan

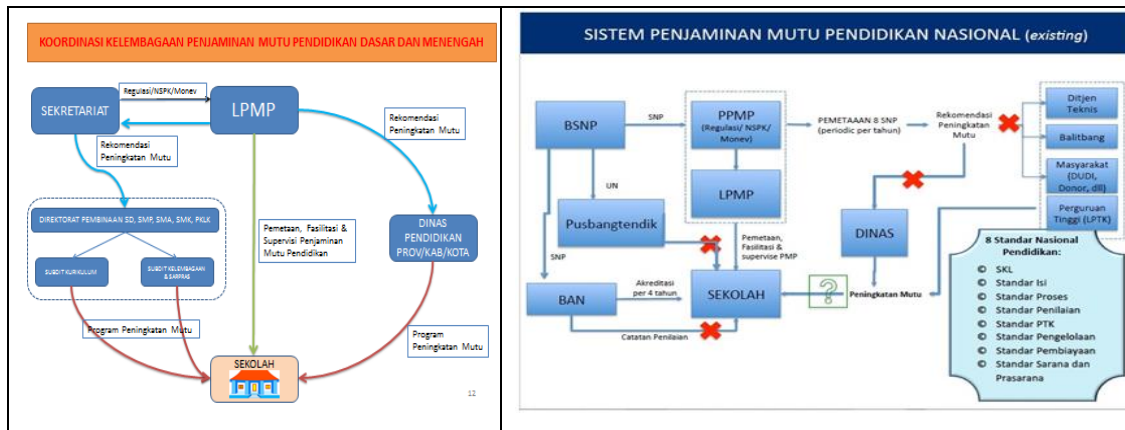
Dalam upaya penguatan jaminan kualitas pendidikan dan meningkatkan kapasitas daerah, pemberdayaan LPMP sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan sangat penting untuk dilakukan. Berbagai permasalahan di tingkat satuan pendidikan menengah; pelaksanaan kurikulum, proses pembelajaran di kelas, kerjasama guru, siswa, orang tua, dan masyarakat lainnya perlu ditumbuhkan melalui lembaga yang berkompeten dalam melakukan pengendalian mutu untuk menuju lembaga sekolah yang kredibel. Pembinaan terhadap LPMP dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga dapat mengemban tugas baru yang menjadi tanggungjawabnya. Pemetaan mutu sekolah dan melihat efektivitas sekolah dapat dijadikan sebagai masukan dalam memberikan intervensi kepada satuan pendidikan dalam menyongsong masyarakat ekonomi asia dan meningkatkan daya saing regional.

8. Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan

LPMP memiliki tugas untuk mengawal keberhasilan pemerintah dalam membangun sektor pendidikan terutama dalam pemenuhan standar nasional pendidikan. Kegiatan ini diharapkan memberikan profil satuan pendidikan pada masing-masing daerah terhadap pemenuhan 8 standar pendidikan. Fasilitas pemenuhan SNP perlu dilakukan agar arah peningkatan kualitas pendidikan dan layanan pendidikan tidak menyimpang dari target tersebut. Secara struktur sistem dan koordinasi kelembagaan penjaminan mutu pendidikan dapat dilihat pada skema berikut:



Bagan 3: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan



Mengingat peningkatan mutu merupakan bagian penting dan strategis bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional, maka LPMP mempunyai keterkaitan dengan unit-unit kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah maupun dengan Dinas Pendidikan di Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan terhadap hal berikut:

- Core Programme, yaitu kegiatan utama dalam rangka penjaminan mutu pendidikan;
- Extended Programme, yaitu program-program direktorat yang dapat disinkronkan dengan dengan LPMP, antara lain pelatihan K-13, Pendampingan dan monev, sekolah model/sekolah rujukan/sekolah Pembina dll.
- Pengembangan kapasitas, yaitu: 1) kapasitas Kelembagaan mengkaji ulang kebutuhan gedung disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang tugas dan fungsi LPMP, dan 2) Pengembangan kapasitas SDM, dengan melakukan pemetaan kompetensi , peningkatan kompetensi, pembinaan karir dan lain sebagainya.

Upaya peningkatan layanan penjaminan mutu pendidikan melalui LPMP dikelola dengan mengacu pada target kinerja, sebagai berikut:

- a. Target Kinerja Kegiatan LPMP Tahun 2016



Tabel 10: Target Kinerja Kegiatan LPMP Tahun 2016

No	Uraian	Satuan	Target 2016	Alokasi Anggaran
1.	Supervisi dan Fasilitasi pencapaian SNP SD	%	25	-
2.	Supervisi dan Fasilitasi pencapaian SNP SMP	%	25	-
3.	Supervisi dan Fasilitasi pencapaian SNP SMA	%	25	-
4.	Supervisi dan Fasilitasi pencapaian SNP SMK	%	25	-

b. Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

Tabel 11: Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

No	Kegiatan	Satuan	Target 2016	Alokasi Anggaran
1.	Pembinaan SD	Kegiatan	7	72.860.458.000
2.	Pembinaan SMP	Kegiatan	6	83.262.934.000
3.	Pembinaan SMA	Kegiatan	5	133.205.475.000
4.	Pembinaan SMK	Kegiatan	6	136.216.296.000
5.	Pembinaan PKLK	Kegiatan	5	34.652.040.000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Program Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2016 memberikan gambaran tentang perkembangan pencapaian kinerja satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2015 – 2019. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja lembaga untuk mencapai 29 Indikator Kinerja Program (IKP) yang dilaksanakan oleh 6 satuan kerja pusat yaitu; Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Pembinaan PKPLK, dan Sekretariat Direktorat Jenderal, serta 33 LPMP, serta kegiatan dekonsentrasi di 34 provinsi. Satuan Kerja tersebut melaksanakan 8 sasaran program yang didistribusikan melalui sebanyakoutput.

Tabel 12: Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Kode	Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	2015	2016		
			Realisasi	Target	Realisasi	%
06 - PROGRAM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH						
SP -01	Pemenuhan Hak Terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar Yang Berkualitas					
IKP1	APM SD/SDLB	%	81,94	82.51 %	81,54%	98.82
IKP2	APK SD/SDLB	%	96,24	97.85 %	93,05%	95.09
IKP3	Angka Putus Sekolah SD	%	0,67	1.04 %	0,26%	39.6
IKP4	APM SMP/SMPLB	%	61,45	72.69 %	74,63%	103
IKP5	APK SMP/SMPLB	%	76,15	81.89 %	75,77%	92.53
IKP6	Angka Putus Sekolah SMP	%	0,87	1.11 %	0.50%	45.05
IKP7	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP	%	78.40	83.64 %	81.68%	97.66
IKP8	Jumlah siswa jenjang pendidikan dasar penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar	Siswa	10.815.709	15.380.582	15.704.020	102
IKP9	Rasio APM perempuan:laki-laki di SD	%	100	100 %	100%	100
IKP10	Rasio APM perempuan:laki-laki di	%	100	100 %	103%	103



Kode	Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	2015	2016		
			Realisasi	Target	Realisasi	%
	SMP					
SP -02	Siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SMLB/Paket C					
IKP11	APK SMA/SMK/SMLB	%	66,41	79.31 %	70,47%	88.9
IKP12	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK	%	96,90	82.00 %	96,96%	118
IKP13	Rasio APK perempuan:laki-laki di SMA/SMK	%	100	100 %	100%	100
SP -03	Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SMLB/ Paket C					
IKP14	Jumlah siswa jenjang pendidikan menengah penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar	Siswa	3.550.863	3,856,676	3.497.617	90.7
IKP15	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	1.81	1.10 %	1,33%	82,70
SP -04	Sekolah Menengah di setiap kecamatan pada tahun 2019					
IKP16	Persentase kecamatan yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah	%	84,74	82,5%	78,11%	94.7
SP -05	Peningkatan Kualitas Pembelajaran					
IKP17	Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang dipersiapkan berakreditasi minimal B	Sek	3,331	15,300	7,012	45,83
IKP18	Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik(pendidikan karakter)	Nilai Sikap	Baik	Baik	Baik	100
IKP19	Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah	Medali Tertimbang	308	148	151	102
IKP20	Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	%	18.00	17.00 %	18.00%	106
IKP21	Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	%	25.00	29.00 %	25.00%	86.2
IKP22	Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	63,36	61.24 %	70,10%	114
IKP23	Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	76,62	75.01 %	70,90%	94.5



Kode	Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	2015	2016		
			Realisasi	Target	Realisasi	%
IKP24	SM menerapkan program penyesuaian dengan dunia kerja	%	7,7	30.0 %	15.0%	50.0
SP -06	Jumlah Sekolah Menengah Rujukan/Model di setiap Kabupaten/Kota					
IKP25	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah Rujukan/Model	%	41,63	49.9 %	100%	200
IKP26	Persentase SM yang memenuhi akreditasi minimal B	%	86	70 %	86%	123
SP-07	Meningkatnya kualitas satuan Pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)					
IKP27	Persentase Satuan Pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya berdasarkan SNP	%	14	29%	29%	100
SP-08	Tata kelola Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang baik					
IKP28	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan	%	85	87%	87%	100
IKP29	Nilai Minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (sangat baik) pada tahun 2019	%	71,09	73	76,58	105

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyelesaikan beberapa tahapan kegiatan untuk mencapai kinerja terbaik. Beberapa indikator kinerja program yang telah diukur pencapaiannya, pada beberapa indikator yang telah ditetapkan tercapai sesuai dengan harapan dan sebagian lainnya di bawah ekspektasi. Evaluasi kinerja organisasi pada periode ini dapat dilakukan melalui realisasi anggaran, pencapaian sasaran dan permasalahan yang kemungkinan menjadi kendala dalam mencapai target Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebagai bahan analisis capaian kinerja data Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015-2016 disajikan sebagai berikut:



Tabel 13: Data Pokok Peserta Didik

No	Jenis Data	Satuan	Jumlah	
			2015	2016
1	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	Orang	27.234.500	27.574.800
2	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	Orang	13.332.200	13.425.000
3	Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun	Orang	13.251.300	13.276.000
4	Jumlah Peserta Didik SD/SDLB	Siswa	26.029.763	25.646.862
5	Jumlah Peserta Didik SMP/SMPLB	Siswa	9.951.121	10.172.008
6	Jumlah Peserta Didik SMA/SMK/SMLB	Siswa	9.411.343	9.355.951
7	Jumlah Peserta Didik SD/SDLB Usia 7-12 Tahun	Siswa	22.576.047	22.306.959
8	Jumlah Peserta Didik SMP/SMPLB 13-15 Tahun	Siswa	8.158.675	7.591.660
9	Jumlah Lulusan SD/SDLB	Siswa	4.184.273	4.381.997
10	Jumlah Lulusan SMP/SMPLB	Siswa	3.131.085	3.464.628
11	Jumlah Lulusan SMA/SMK/SMLB	Siswa	2.542.518	2.853.477
12	Jumlah SD/SDLB	Sekolah	148.353	148.387
13	Jumlah SMP/SMPLB	Sekolah	37.589	37.608
14	Jumlah SMA/SMLB	Sekolah	12.973	13.459
15	Jumlah SMK	Sekolah	11.611	12.272

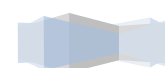
Selanjutnya pencapaian kinerja IKP tahun 2016 disajikan melalui uraian dibawah ini:

1. Pemenuhan Hak Terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas.

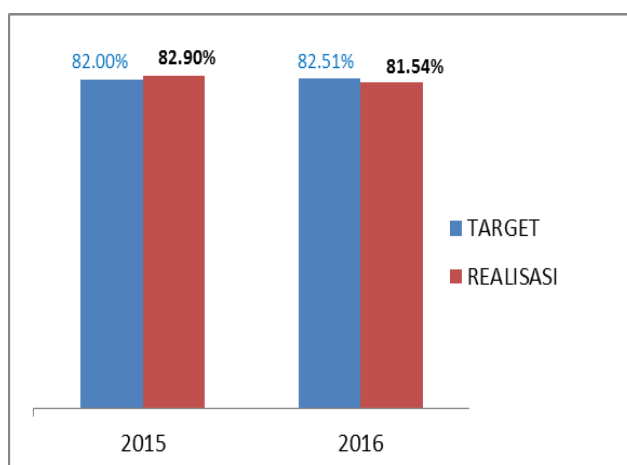
Peningkatan pemenuhan pelayanan pendidikan dasar dapat dipenuhi jika indikator terkait dengan penambahan akses untuk pendidikan yang bermutu dapat terpenuhi. Indikator tersebut berupa peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB dan APM SMP/SMPLB maupun APK SMP/SMPLB. Untuk mendapatkan pencapaian yang optimal dilakukan pula upaya sehingga dapat menjamin keberlangsungan peserta didik agar tidak *drop out (DO)*. Pencapaian kinerja terhadap indikator tersebut sebagaimana berikut ini:

a. Indikator Kinerja Program (IKP) 1: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB 82,00%

Peningkatan APM SD/SDLB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 7-12 tahun. Pada tahun 2016 jumlah penduduk usia tersebut sebanyak 27.574.800 orang. Sementara daya tampung untuk jenjang SD/SDLB pada tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 25.646.862 peserta didik SD/SDLB. Peserta didik dengan usia 7- 12 tahun sebanyak 22.478.986 (81,54%). Dengan demikian tingkat partisipasi murni APM SD/SDLB adalah 81,54%. Persentase capaian kinerja indikator ini terhadap target kinerja tahun 2016 adalah 98,82%.



Grafik 1: Indikator Kinerja Program



Jika dibanding dengan tahun 2015 persentase pencapaian kinerja sebesar 101%, maka kinerja tahun 2016 lebih rendah daripada kinerja tahun 2015. Penurunan tersebut tampak pada penurunan jumlah siswa SD/SDLB demikian pula jumlah siswa usia 7-12 tahun. Penurunan jumlah peserta didik SD dimungkinkan oleh meningkatnya animo masyarakat untuk memasukkan anak usia 7-12 tahun ke Madrasah Ibtidaiyah (MI). Hal ini tampak pada peningkatan jumlah siswa MI dari 3.141.269 peserta didik pada tahun 2015 menjadi 3.692.315 peserta didik, dengan kontribusi APM sebesar 13,39%. Dengan demikian Pencapaian APM SD/SDLB/MI/Paket A secara nasional adalah 93,73%. Sebesar 6,27% penduduk usia 7-12 diperkirakan telah memasuki jenjang pendidikan SMP atau sederajat dan sebagian kecil belum tertampung di lembaga pendidikan formal. Pada tahun 2015/2016 jumlah kabupaten/kota dengan capaian APM di bawah 60% sebanyak 39 kabupaten/kota, sedangkan pada tahun 2016/2017 sebanyak 3 kabupaten sebagai berikut:

Tabel 14: APM SD/SDLB < 60% Tahun 2016/2017

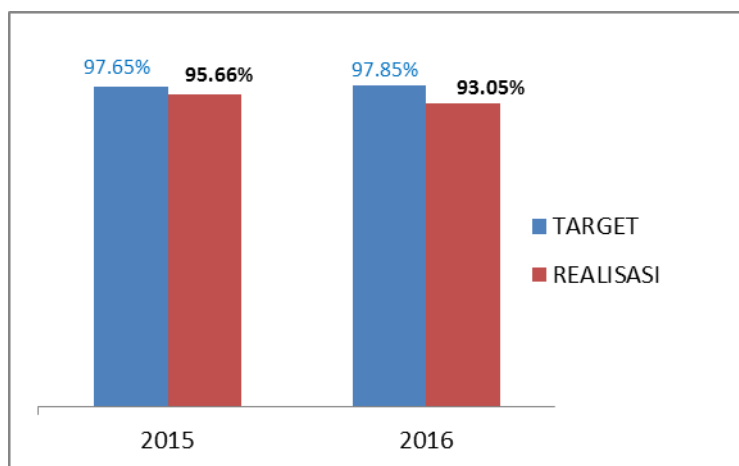
No	Nama Provinsi	Kabupaten/Kota	APM
1	Papua	Kab. Deiyai	59,47
2	Papua	Kab. Puncak	48,05
3	Papua	Kab. Memberamo Raya	26,62



b. Indikator Kinerja Program (IKP) 2: Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB 97,65%

Peningkatan APK SD/SDLB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan bagi semua. Pada tahun 2016 jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 27.381.500 orang. Sementara daya tampung untuk jenjang SD/SDLB pada tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 25.964.953 peserta didik SD/SDLB. Dengan demikian tingkat partisipasi kasar SD/SDLB adalah 93,05%. Persentase capaian kinerja indikator ini terhadap target kinerja tahun 2016 adalah 95,09%.

Grafik 2: Persentase capaian kinerja indikator terhadap target kinerja



Jika dibanding dengan tahun 2015 persentase pencapaian kinerja sebesar 97,88%, maka kinerja tahun 2016 lebih rendah daripada kinerja tahun 2015. Penurunan tersebut tampaknya disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan dimungkinkan oleh meningkatnya animo masyarakat untuk memasukkan anaknya ke Madrasah Ibtidaiyah (MI). Hal ini tampak pada peningkatan jumlah siswa MI dari 3.463.028 peserta didik pada tahun 2015 menjadi 3.692.315 peserta didik, dengan kontribusi APK sebesar 13,44%. Dengan demikian Pencapaian APK SD/SDLB/MI/Paket A secara nasional adalah 106,44%.



Tabel 15: APK SD/SDLB,75% Tahun 215/2016

APK SD/SDLB < 75% Tahun 2015/2016			
No	Provinsi	Kab/Kota	APK
1	Aceh	Kota Banda Aceh	73.16
2	Aceh	Kab. Aceh Besar	72.57
3	Aceh	Kab. Pidie Jaya	70.05
4	Aceh	Kab. Bireuen	64.97
5	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	69.42
6	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	74.65
7	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	74.60
8	Jawa Timur	Kab. Blitar	71.87
9	Jawa Timur	Kab. Gresik	66.57
10	Jawa Timur	Kab. Jombang	66.15
11	Jawa Timur	Kab. Pamekasan	65.47
12	Jawa Timur	Kab. Sampang	65.35
13	Jawa Timur	Kab. Lamongan	59.77
14	Jawa Timur	Kab. Sumenep	58.71
15	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	60.66
16	Papua	Kab. Paniai	70.89
17	Papua	Kab. Deiyai	66.19
18	Papua	cab. Puncak	59.36

c. Indikator Kinerja Program (IKP) 3: Angka Putus Sekolah (APtS) SD/SDLB 1,04%

Menekan angka putus sekolah SD/SDLB dimaksudkan menjamin keberlangsungan belajar pada peserta didik SD/SDLB. Angka putus sekolah ini ditekan serendah mungkin agar tidak melampaui angka 1,04%, atau tidak melebihi 270,036 peserta didik SD/SDLB yang putus sekolah dengan berbagai alasan. Upaya tersebut dapat terlampaui dengan jumlah peserta didik SD/SDLB yang putus sekolah sebanyak 68,066 peserta didik atau 0,26%. Dengan demikian pencapaian kinerja IKP ini adalah 397%. Persentase capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 149%. Angka putus sekolah tersebut dapat ditekan melalui keberlangsungan penyaluran BOS dan PIP untuk peserta didik SD.

Pencapaian Indikator Program (IKP) 1, 2, dan 3 tersebut didukung oleh pencapaian kinerja output antara lain berupa pembangunan unit sekolah baru



(USB) SD, pembangunan ruang kelas baru SD/SDLB, penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS), dan Penyaluran program indonesia pintar (PIP).

Pencapaian output pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 16: Output Pendukung Pencapaian APM SD/SDLB

No	Output/ Kegiatan	Satuan	2015	2016		% Capaian
				Target	Realisasi	
1	Unit Sekolah Baru (USB) SD	unit	17	24	24	100
2	Unit Sekolah Baru (USB) SDLB	unit	10	33	33	100
3	Ruang Kelas Baru (RKB) SD	ruang	3.144	1,650	1,141	69.15
4	Ruang Kelas Baru (RKB) SDLB	ruang	78	215	212	99
5	Asrama SLB	unit	17	2	2	100
6	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	siswa	26,029,763	25,964,953	25.468.885	96,09
7	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PKLK	siswa	2.264	2,452	2,412	98.37
8	Program Indonesia Pintar (PIP) SD	siswa	10,815,709	10,360,614	10,906,947	105

d. Indikator Kinerja Program (IKP) 4: Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB 72,69%

Peningkatan APM SMP/SMPLB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 13-15 tahun. Pada tahun 2016 jumlah penduduk usia tersebut sebanyak 13.390.600 orang. Sementara daya tampung untuk jenjang SMP/SMPLB pada tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 10.063.966 peserta didik. Peserta didik dengan usia 13-15 tahun sebanyak 7.591.660 (56,55%). Dengan demikian tingkat partisipasi murni APM SMP/SMPLB adalah 61,79%. Persentase capaian kinerja indikator ini terhadap target kinerja tahun 2016 adalah 85,00%. Jika dibanding dengan tahun 2015



persentase pencapaian kinerja sebesar 85,15%, maka kinerja tahun 2016 lebih rendah daripada kinerja tahun 2015. Walaupun APM ini tersebut mengalami penurunan, namun jumlah siswa SMP/SMPLB pada usia 13-15 tahun mengalami peningkatan 1,41%. Hal ini tampak pada peningkatan jumlah siswa usia tersebut dari 8.158.675 peserta didik pada tahun 2015 menjadi 8.273.946 peserta didik pada tahun 2016. Sementara itu pencapaian APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B tahun 2016 adalah sebesar 81,01%. Dengan demikian kontribusi MTs atau sederajat dan Paket B kurang lebih sebesar 19,21% atau sebanyak 2.574.360 peserta didik.

e. Indikator Kinerja Program (IKP) 5: Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB 81,89%

Peningkatan APK SMP/SMPLB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam keberlangsungan wajib belajar sembilan tahun. Pada tahun 2016 jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 13.425.000 orang. Sementara daya tampung untuk jenjang SMP/SMPLB pada tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 10.172.008 peserta didik. Dengan demikian tingkat pencapaian APK SMP/SMPLB adalah 75,77%. Persentase capaian kinerja indikator ini terhadap target kinerja tahun 2016 adalah 91,77%. Jika dibanding dengan tahun 2015 persentase pencapaian kinerja sebesar 92,46%, maka kinerja tahun 2016 lebih rendah daripada kinerja tahun 2015. Walaupun APK tersebut mengalami penurunan, namun jumlah siswa SMP/SMPLB mengalami peningkatan 0,85%. Hal ini tampak pada peningkatan jumlah siswa usia tersebut dari 9.951.121 peserta didik pada tahun 2015 menjadi 10.172.008 peserta didik pada tahun 2016. Sementara itu pencapaian APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B tahun 2016 adalah sebesar 101,05%. Dengan demikian kontribusi MTs atau sederajat dan Paket B kurang lebih sebesar 25,28% atau sebanyak 2.650.326 peserta didik.

f. Indikator Kinerja Program (IKP) 6: Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB (1,11%)

Pada tahun 2016 Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB adalah sebesar 0,50%. Jika dibandingkan dengan target tersebut, persentase pencapaian kinerja untuk AptS adalah 218%. Pencapaian kinerja ini didukung oleh gencarnya upaya pemerintah dalam penyaluran dana BOS dan PIP. Kedua program tersebut dapat



menekan angka putus sekolah pada jenjang SMP/SMPLB. Jumlah peserta didik SMP/SMPLB pada Januari 2016 adalah sebanyak 10.115.508 siswa. Pada akhir Desember 2016 jumlah peserta didik menjadi 10.063.966 siswa. Dengan demikian terjadi putus sekolah sebanyak 51.542 siswa. Putus sekolah pada peserta didik SMP/SMPLB disebabkan oleh antara lain kondisi ekonomi keluarga yang memaksa mereka meninggalkan bangku sekolah untuk membantu orang tua mencari nafkah bagi keluarga.

g. Indikator Kinerja Program (IKP) 7: Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/SMPLB 83,64%

Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun mengharuskan setiap lulusan SD/MI memperoleh akses untuk melanjutkan ke jenjang SMP/SMPLB/MTs. Pada tahun 2016 jumlah lulusan SD sebanyak 4.327.492 peserta didik, dan daya tampung SMP/SMPLB kelas VII sebanyak 3.534.547 peserta didik baru. Dengan asumsi jumlah peserta didik baru berasal dari SD maka angka melanjutkan SD ke SMP sebesar 81,68%. Sebanyak 18,32% lulusan SD dimungkinkan melanjutkan pendidikan ke jenjang MTs atau pendidikan non formal lainnya dan sebagian kecil tidak melanjutkan ke SMP. Persentase capaian kinerja pada indikator tersebut adalah sebesar 97,66%. Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2015 sebesar 92,65%, maka kinerja tahun 2016 meningkat 5,01%.

h. Indikator Kinerja Program (IKP) 8: Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Dasar Penerima Bantuan Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) 15.380.582 Siswa.

Sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah sebanyak 17.927.308 penduduk usia 7 – 21 tahun. Jumlah tersebut merupakan data penduduk miskin dan keluarga rentan miskin baik yang sedang bersekolah maupun yang tidak bersekolah. Pada tahun 2016 jumlah peserta didik yang berhak menerima manfaat PIP sebanyak 15.380.582 siswa. Jumlah tersebut merupakan hasil pengolahan data dari Dapodikdasmen yang telah diverifikasi. Namun penyaluran penerima manfaat PIP mencapai 15.704.020 siswa atau (102%). Jika dibanding realisasi tahun 2015 sebanyak 15.491.524 maka jumlah penerima manfaat PIP tahun 2016 mengalami



peningkatan. Perbedaan jumlah sasaran dan realisasi ini dimungkinkan terjadi antara lain karena pemerintah membuka peluang bagi siswa miskin atau rentan miskin yang tidak menerima kartu dipernolehkan mendaftarkan melalui sekolah. Kelompok tersebut adalah anak yatim piatu, anak korban pemutusan hubungan kerja, dan faktor lainnya yang menyebabkan ketidakberdayaan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah.

i. Indikator Kinerja Program (IKP) 9: Rasio APM perempuan: APM laki-laki di SD (100%)

Partisipasi pendidikan pada jenjang sekolah dasar (SD) terbuka baik untuk siswa perempuan maupun siswa laki-laki. Perbandingan jumlah siswa SD perempuan:jumlah siswa SD laki-laki adalah 109%. Secara umum partisipasi pendidikan SD pada perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi pendidikan SD pada laki-laki.

j. Indikator Kinerja Program (IKP) 10: Rasio APM perempuan:APM laki-laki di SMP (100%)

Partisipasi pendidikan pada jenjang sekolah menengah dasar (SMP) terbuka baik untuk siswa perempuan maupun siswa laki-laki. Perbandingan jumlah siswa SMP perempuan:jumlah siswa SMP laki-laki adalah 103%. Secara umum partisipasi pendidikan SMP pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi pendidikan SMP pada perempuan.

2. Siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SMLB

a. Indikator Kinerja Program (IKP) 11: APK SMA/SMK/SMLB (79,31%)

Pencapaian APK SMA/SMK/SMLB adalah sebesar 70,47%. Dengan demikian pencapaian kinerja IKP ini adalah 84,57%. Target IKP pada indikator tersebut tidak tercapai. Pencapaian APK SMA/SMK/SMLB/MA/Paket C secara nasional adalah sebesar 81,95%. Dengan demikian kontribusi pencapaian APK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terhadap capaian APK nasional adalah sebesar 88,52%. Sementara itu kontribusi MA/Paket C adalah sebesar 11,48%. Adapun kabupaten / kota dengan APK SMA/SMK/SMLB di bawah 50% sebanyak 20 kabupaten. Berikut kabupaten/kota dengan APK SMA/SMK/SMLB dibawah 50%.



Tabel 17: APK SMA/SMK/SMLB < 50% Tahun 2016/2017

No	Nama Provinsi	Kabupaten / Kota	APK
1	Papua	Kab. Boven Digoel	49.6
2	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Selatan	45.9
3	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah	45.7
4	Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung	43.3
5	Papua	Kab. Mappi	40.1
6	Papua Barat	Kab. Maybrat	38.9
7	Papua	Kab. Paniai	36.8
8	Papua	Kab. Yalimo	27.4
9	Papua	Kab. Deiyai	25.9
10	Papua	Kab. Puncak Jaya	25.0
11	Papua	Kab. Asmat	24.7
12	Papua	kab. Puncak	24.1
13	Papua	Kab. Membramo Tengah	23.7
14	Papua	Kab. Nduga	20.5
15	Papua	Kab. Tolikara	19.8
16	Papua	Kab. Lanny Jaya	14.4
17	Papua	Kab. Yahukimo	13.4
18	Papua	Kab. Pegunungan Bintang	13.0
19	Papua	Kab. Dogiyai	12.1
20	Papua	Kab. Intan Jaya	10.8

b. Indikator Kinerja Program (IKP) 12: Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK (82%)

Jumlah lulusan SMP/MTs tahun ajaran 2015/2016 adalah sebanyak 3.274.813 orang. Daya tampung peserta didik baru SMA/SMK/SMLB pada tahun yang sama adalah sebesar 3.175.407 orang. Berdasarkan jumlah daya tampung SMP/SMPLB tersebut maka tingkat angka melanjutkan pada tahun 2016 kurang lebih sebesar 96,96% peserta didik. Sementara itu sebesar 3,04% lulusan SMP kemungkinan melanjutkan ke Madrasah dan sebagian kecil tidak melanjutkan pendidikannya.

c. Indikator Kinerja Program (IKP) 13: Rasio APK perempuan : APK laki-laki di SMA/ SMK (100%)

Partisipasi pendidikan pada jenjang sekolah menengah terbuka untuk siswa perempuan maupun siswa laki-laki. Perbandingan jumlah siswa



SMA/SMK/SMLB perempuan: jumlah siswa SMA/SMK/SMLB laki-laki adalah 100%. Secara umum partisipasi pendidikan SMA/SMK/SMLB pada perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi pendidikan SMA/SMK/SMLB pada laki-laki.

3. Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SMLB

a. Indikator Kinerja Program (IKP) 14: Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Menengah Penerima Bantuan Melalui KIP

Jumlah siswa miskin dan siswa dari keluarga rentan miskin jenjang pendidikan menengah adalah sebanyak 3.856.676 siswa. Pada tahun 2016 telah disalurkan kepada 3.497.617 penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP). Pencapaian Kinerja 90,7%. Jika dibanding realisasi tahun sebelumnya sebanyak 3.550.863 maka jumlah penerima manfaat PIP pendidikan menengah mengalami penurunan.

b. Indikator Kinerja Program (IKP) 15: Angka Putus Sekolah SMA/SMK

Pada tahun 2016 Angka Putus Sekolah SMA/SMK adalah sebesar 1,33%. Jumlah peserta didik SMA/SMK pada Januari 2016 adalah sebanyak 8.776.209 siswa. Pada akhir tahun jumlah peserta didik menjadi 8.657.856 Siswa. Dengan demikian terjadi putus sekolah sebanyak 118.353 siswa. Pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 82,70%. Putus sekolah pada peserta didik SMA/SMK disebabkan oleh antara lain kondisi ekonomi keluarga yang memaksa mereka meninggalkan bangku sekolah untuk membantu orang tua mencari nafkah bagi keluarga.

4. Indikator Kinerja Program (IKP) 16: Sekolah Menengah di setiap kecamatan pada tahun 2019

Pada tahun 2016 wilayah Indonesia terdiri dari 514 kabupaten/kota dan 7.057 Kecamatan. Jumlah Satuan Pendidikan SMA/SMK sebanyak 25.826 sekolah yang tersebar di 6.404 Kecamatan dan 514 kabupaten/kota. Jumlah kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan SMA/SMK adalah sebanyak 653 kecamatan. Realisasi target kinerja program sebesar 78,11% sehingga masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 82,50%. Sementara itu persentase pencapaian kinerja program adalah 94,7%. Seiring dengan diberlakukannya UU No. 23 tentang Pembagian



Kewenangan Pemerintahan Daerah maka pada masa peralihan tahun 2016 pembangunan fisik bangunan untuk sementara SMA/SMK ditunda. Selanjutnya Pemerintah Provinsi akan melakukan analisis kebutuhan pembangunan USB SMA lebih lanjut pada tahun berikutnya. Untuk memenuhi target IKP tersebut perlu dipertimbangkan mengenai daya dukung ketersediaan siswa pada setiap kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah (SM). Berdasarkan pemantauan dari Dapodikdasmen, pada beberapa kecamatan tidak memiliki daya dukung jumlah siswa SMP yang cukup untuk didirikan unit sekolah baru SMA/SMK.

5. Peningkatan Kualitas Pembelajaran

a. Indikator Kinerja Program (IKP) 17: Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang dipersiapkan berakreditasi minimal B.

Pada tahun 2016 target persiapan akreditasi untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB adalah sebanyak 15,300 sekolah. Mempersiapkan sekolah agar berakreditasi minimal B dilakukan melalui pelaksanaan pembinaan teknis bagi penyelenggaraan pendidikan secara berjenjang melalui provinsi, kabupaten/kota dan pengawas sekolah. Melalui pembinaan teknis ini diharapkan dapat mendorong sekolah memenuhi persyaratan admionsitrasi dalam rangka akreditasi sekolah dengan baik, sehingga hasil akreditasi sesuai dengan target minimal yaitu;

- *Pembangunan ruang kelas baru sasaran 1.141 ruang;*
- *Rehabilitasi ruang kelas SD/SDLB sebanyak 4.841 ruang;*
- *Pembangunan perpustakaan SD/SDLB sebanyak 621 ruang;*
- *Bantuan peralatan pendidikan SD sebanyak 3.360 SD;*
- *Pelaksanaan Kurikulum 2013 tingkat SD sebanyak 37.034 sekolah;*
- *Revitalisasi sekolah sebanyak 129 SD;*
- *Sekolah Rujukan sebanyak 452 SD.*
- *Sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah sebanyak 28.030 sekolah;*

Tabel 18: Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB berakreditasi minimal B.

No	Output Pendukung	Satuan	Realisasi 2015	2016		Persen
				Target	Realisasi	



No	Output Pendukung	Satuan	Realisasi 2015	2016		Persen
				Target	Realisasi	
1.	Satuan Pendidikan SD yang Mendapatkan Standardisasi dan Akreditasi	Sekolah	1.530	6.631	7.012	106
2.	Satuan Pendidikan SMP yang Mendapatkan Standardisasi dan Akreditasi	Sekolah	1.767	530	-	-
3.	Satuan Pendidikan SLB yang Mendapatkan Standardisasi dan Akreditasi	Sekolah	68	17	15	88.23

b. Indikator Kinerja Program (IKP) 18: Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik (pendidikan karakter).

Pencapaian: Pembangunan manusia seutuhnya diawali dengan pembentukan jati diri yang melekat kuat pada setiap peserta didik. Pendidikan karakter merupakan upaya membangun jatidiri bangsa melalui penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pendidikan karakter sejalan dengan upaya revolusi mental yang merupakan program prioritas nasional. Beberapa aspek dalam pendidikan karakter diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu berbagai kegiatan yang bertujuan untuk penguatan karakter peserta didik antara lain melalui muatan pendidikan anti korupsi, kepramukaan, gerakan literasi sekolah, perlombaan/olimpiade nasional dan internasional.

Tabel 19: Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik (pendidikan karakter).

No	Output Pendukung	Satuan	Realisasi 2015	2016		Persen
				Target	Realisasi	
1.	Siswa SD yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Siswa	10	3.695	878	77,89
2.	Siswa SMP yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Siswa	4.000	6.456	4.444	68,73
3.	Siswa SLB yang Mengikuti	Siswa	2.196	1.448	510	35,22



No	Output Pendukung	Satuan	Realisasi 2015	2016		Persen
				Target	Realisasi	
	Lomba, Festival, dan Olimpiade					
4.	Siswa SMA yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Siswa	17	35	2.091	0
5.	Siswa SMK yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade	Bidang/ Siswa	100	2.350	2.500	106
6.	SD yang Mendapatkan Pembinaan Ekstrakurikuler	Sekolah	5.400	4.965	2.029	81,15
7.	SMP yang Mendapatkan Pembinaan Ekstrakurikuler	Sekolah	1.335	7.431	852	11,47
8.	SLB yang Mendapatkan Pembinaan Ekstrakurikuler	Sekolah	88	102	100	98,03
9.	SMA yang menerapkan pendidikan karakter bangsa	Siswa	443	443	13.809	
10.	SMK yang menerapkan pendidikan karakter bangsa	Sekolah	4.346	5.480	764	13,94

Permasalahan: Keberhasilan pendidikan karakter sebagai salah satu muatan perubahan paradigma atau revolusi mental dalam hal pembentukan perilaku siswa sebagai pembelajar masih mengalami penundaan. Implementasi kurikulum 2013 masih harus mengalami perbaikan disebabkan adanya beberapa kendala teknis di lapangan. Pembentukan kepribadian berupa pola berpikir kritis, analitis dan logis yang kuat sangat diperlukan untuk menyiapkan masyarakat yang peka terhadap lingkungan sekitar.

Antisipasi: Muatan kurikulum pendidikan dasar dan menengah secara integratif harus dapat menumbuhkan karakter yang kuat bagi peserta didik. Oleh karena itu setiap mata pelajaran dan setiap tema pembelajaran tidak meninggalkan pesan moral dan penguatan karakter siswa.

- c. Indikator Kinerja Program (IKP) 19:** Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah.



Pada tahun 2016 Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengirimkan delegasi kompetisi internasional yang diikuti oleh siswa SD, SMP, SLB, SMA dan SMK. Target medali tertimbang tahun 2016 adalah 148 dengan realisasi 151 dari berbagai cabang. Beberapa kompetisi yang diikuti adalah sebagai berikut:

Tabel 20: Perolehan medali tertimbang dari kompetisi Internasional

Nama Lomba	Tempat	Jenjang	Perolehan Medali			
			Emas	Perak	Perunggu	Jumlah
Jumlah			19	30	34	83
International Mathematics Competition	CHIANG MAI, THAILAND, 14-20 AGUSTUS 2016	SD	-	-	2	2
Coupe International De Kayl	LUXEMBOURG, 12-18 OKTOBER 2016	SD	5	1	2	8
World Creativity Festival (WCF)	DAEJEON, REPUBLIK KOREA, 20-24 OKTOBER 2016	SD	1	-	1	2
12 th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School	KOTA TANGERANG, 9 S-13 NOVEMBER 2016	SD	2	5	2	9
The Thailand International Mathematics Competition (TIMC 2016)	Chiang Mai, Thailand	SMP	1	4	5	10
The 13 th Malaysia International Chess Festival (MICF 2016)	Kuala Lumpur, Malaysia	SMP	2	2	2	6
The 7 th Basel Open Masters (BOM 2016)	Basel, Switzerland	SMP	6	3	3	12
the 13 th International Junior Science Olympiad (IJSO 2016)	Bali, Indonesia	SMP	-	-	-	-



Nama Lomba	Tempat	Jenjang	Perolehan Medali			
			Emas	Perak	Perunggu	Jumlah
Emas, earth science project	20 s.d. 27 Agustus 2016, Mie, Jepang	SMA	-	-	1	1
Emas, Internasional Team Field Investigation	20 s.d. 27 Agustus 2016, Mie, Jepang	SMA	-	1	-	1
Finalis Intel ISEF	6 - 18 Mei 2016, Phoenix, USA	SMA	-	-	-	-
International Biology Olympiad (IBO)	17 s.d. 24 July 2016, Hanoi, Vietnam	SMA	1	2	1	4
International Chemistry Olympiad (IChO)	20 s.d. 29 July 2016, Tbilisi, Georgia	SMA	-	2	2	4
International Earth Science Olympiad (IESO)	20 s.d. 27 Agustus 2016, Mie, Jepang	SMA	-	-	1	1
International Geography Olympiad (IGEO)	17 s.d. 23 Agustus 2016, Beijing, China	SMA	-	-	4	4
International Mathematics Olympiad (IMO)	6 s.d. 16 July 2016, Hongkong	SMA	-	3	3	6
International Olympiad in Informatics (IOI)	12 s.d.19 Agust 2016, Kazan, Rusia	SMA	-	-	4	4
International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)	9 - 19 Desember 2016, Bhubaneswar, India	SMA	-	-	-	-
International Physics Olympiad (IPhO)	10 s.d. 18 July 2016, Zurich, Swiss	SMA	1	4	-	5
Meraih 2 Kemenangan World Schools Debating Championship	19 - 29 Juli 2016, Stuttgart, Jerman	SMA	-	-	-	-
Perunggu, Internasional Team Field Investigation	20 s.d. 27 Agustus 2016,	SMA	-	-	1	1



Nama Lomba	Tempat	Jenjang	Perolehan Medali			
			Emas	Perak	Perunggu	Jumlah
	Mie, Jepang					
Dress The Cake		PKLK	-	3	-	3

d. Indikator Kinerja Program (IKP) 20: Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP.

Pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan SNP meliputi 11 item, yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi dan tempat bermain/berolahraga.

Untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas dilakukan melalui pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD/SDLB. Selain itu pemenuhan sarana dan prasarana lainnya berupa pembangunan perpustakaan dan laboratorium IPA. Berikut adalah intervensi peningkatan pemenuhan SNP SD/SDLB berupa:

Tabel 21: SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP.

No	Output Pendukung	Satuan	Realisasi 2015	2016		Persen
				Target	Realisasi	
1.	Pembangunan RKB SD	Ruang	2.995	2.215	1.141	51,51
2.	Pembangunan RKB SDLB	Ruang	92	300	212	70,66
3.	Pembangunan Perpustakaan/ PSB	Unit	1.452	1.320	621	47,04

Permasalahan: Pemenuhan standar sarana dan prasarana SD terkendala antara lain oleh keterbatasan alokasi anggaran untuk melakukan pemenuhan berupa pembangunan laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi dan tempat bermain/berolahraga. Dari 11 item pemenuhan SNP dari Direktorat Jenderal hanya mengalokasikan untuk penambahan ruang kelas baru dan pembangunan perpustakaan dengan alokasi dana yang terbatas.



Antisipasi: Pemenuhan SNP sarana dan prasarana SD/SDLB dapat terpenuhi jika prioritas pembangunan sarana dan prasarana menjadi perhatian bukan hanya pemerintah namun juga provinsi/kabupaten/kota.

e. Indikator Kinerja Program (IKP) 21: Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP.

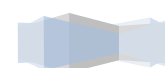
Pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan SNP meliputi 11 item, yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi dan tempat bermain/berolahraga.

Untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas dilakukan melalui pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMP/SMPLB. Selain itu pemenuhan sarana dan prasarana lainnya berupa pembangunan perpustakaan dan laboratorium IPA. Berikut adalah intervensi peningkatan pemenuhan SNP SMP/SMPLB berupa:

Tabel 22: SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP.

No	Output Pendukung	Satuan	Realisasi 2015	2016		Persen
				Target	Realisasi	
1.	Pembangunan RKB SMP	Ruang	2.813	3.726	2.770	74,34
2.	Pembangunan Perpustakaan/ PSB	Unit	792	850	564	66,35
3.	Pembangunan Laboratorium IPA	Unit	956	560	562	100,4

Permasalahan: Pemenuhan standar sarana dan prasarana SMP/SMPLB terkendala antara lain oleh keterbatasan alokasi anggaran untuk melakukan pemenuhan berupa pembangunan ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi dan tempat bermain/berolahraga. Dari 11 item pemenuhan SNP dari Direktorat Jenderal hanya mengalokasikan untuk penambahan ruang kelas baru dan pembangunan perpustakaan, serta Pembangunan laboratorium IPA dengan alokasi dana yang terbatas.



Antisipasi: Pemenuhan SNP sarana dan prasarana SMP/SMPLB dapat terpenuhi jika prioritas pembangunan sarana dan prasarana menjadi perhatian bukan hanya pemerintah namun juga provinsi/kabupaten/kota.

Tabel 23: Sarana dan prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah

Satuan Pendidikan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total	Jumlah Ruang	Persentase Kerusakan (R. Berat + R. Total)
SD	270.028	601.393	69.551	58.269	49.875	1.049.116	10,31%
SMP	99.853	195.791	21.683	17.057	13.208	347.592	8,71%
SMA	69.147	70.773	4.943	3.224	3.354	151.441	4,34%
SMK	65.375	69.571	3.115	2.502	2.612	143.175	3,57%
SLB	7.017	11.032	718	524	346	19.727	4,41%
JUMLAH	511.420	948.560	100.010	81.576	69.395	1.711.051	

f. Indikator Kinerja Program (IKP) 22: Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) SD meliputi pemenuhan terhadap 4 standar pendidikan yaitu ketenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan pengelolaan. Keempat standar tersebut diuraikan menjadi 27 indikator pencapaian yang merupakan target yang harus dipenuhi oleh kabupaten/kota dan satuan pendidikan. Adapun pencapaian rerata nasional pada IP jenjang pendidikan SD adalah sebagai berikut:

Tabel 24: SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi 2015	2016		Persen
				Target	Realisasi	
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	lokasi	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk	rombel	82,31%	100%	82,22%	82,22%



No	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi 2015	2016		Persen
				Target	Realisasi	
	SD/MI tidak melebihi 32 orang.					
3	Untuk setiap rombongan belajar SD/MI tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.	rombel	59,16%	100%	59,19%	59,19%
4	Di setiap SD/MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya.	ruang	26,41%	100%	26,46%	26,46%
5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.	sekolah	100%	100%	100%	100%
6	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik.	sekolah	100%	100%	99,53%	99,53%
7	Di setiap SD/MI memiliki 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.	sekolah	99,56%	100%	99,53%	99,53%
8	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	sekolah	100%	100%	100%	100%
9	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV.	sekolah	100%	100%	100%	100%
10	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	sekolah	100%	100%	100%	100%



No	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi 2015	2016		Persen
				Target	Realisasi	
11	Di setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	sekolah	76,91%	100%	76,84%	76,84%
12	Jumlah SD atau MI yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama ? 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	sekolah	68,57%	100%	68,84%	68,84%
13	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.	sekolah	56,72%	100%	57,28%	57,28%
14	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.	set	33,21%	100%	29,16%	29,16%
15	Jumlah SD/MI yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi	sekolah	44,32%	100%	44,69%	44,69%
16	Jumlah guru tetap SD atau MI yang rata-rata jam kerja per minggu lebih dari atau sama dengan 37.5 jam	guru	94,13%	100%	88,69%	88,69%
17	Jumlah SD atau MI yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka kelas I s/d kelas VI seperti diatas	sekolah	50,15%	100%	53,71%	53,71%
18	Jumlah SD atau MI yang menerapkan KTSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	sekolah	98,68%	100%	98,69%	98,69%



No	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi 2015	2016		Persen
				Target	Realisasi	
19	Jumlah guru SD atau MI yang menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya	guru	100%	100%	100%	100%
20	Jumlah guru SD atau MI yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.	guru	100%	100%	100%	100%
21	Jumlah SD atau MI yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	sekolah	78,46%	100%	78,63%	78,63%
22	Jumlah SD atau MI yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Kantor Kemenag Kabupaten/Kota pada setiap akhir semester	sekolah	98,88%	100%	98,68%	98,68%
23	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	sekolah	97,44%	100%	97,12%	97,12%

g. Indikator Kinerja Program (IKP) 23: Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 25: Indikator Kinerja Program

No	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi 2015	2016		Persen
				Target	Realisasi	
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen		100%	100%	100%	100%
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang.		86,40%	100%	86,41%	86,41%



No	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi 2015	2016		Persen
				Target	Realisasi	
	Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas.					
3	Untuk setiap rombongan belajar SMP/MTs tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.		64,79%	100%	64,74%	64,74%
3	Di setiap SMP/MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen.		4,20%	100%	4,35%	4,35%
4	Di setiap SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya; dan ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru		42,15%	100%	29,52%	29,52%
5	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran		88,63%	100%	88,62%	88,62%
6	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memenuhi sertifikat pendidik; untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%		62,63%	100%	62,63%	62,63%
7	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris		98,06%	100%	96,86%	96,86%
8	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik		64,81%	100%	64,82%	64,82%



No	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi 2015	2016		Persen
				Target	Realisasi	
9	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik		N.A.	100%	62,05%	62,05%
10	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif		100%	100%	100%	100%
11	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan		62,01%	100%	62,05%	62,05%
12	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah disertifikasi oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik		37,00%	100%	37,39%	37,39%
13	Setiap SMP/MTs memiliki 200 <i>judul buku</i> pengayaan dan 20 buku referensi		38,87%	100%	38,66%	38,66%
14	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan termasuk melakukan tatap muka di kelas, merencanakan pembelajaran, membimbing peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan lainnya.		78,32%	100%	88,69%	88,69%
15	Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelas I-II: 18 jam per minggu ✓ Kelas III: 24 jam per minggu ✓ Kelas IV-VI: 27 jam per minggu ✓ Kelas VII-IX: 27 jam per minggu 		65,25%	100%	53,71%	53,71%



No	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi 2015	2016		Persen
				Target	Realisasi	
16	Setiap satuan pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku		98,63%	100%	98,67%	98,67%
17	Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya		100%	100%	100%	100%
18	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik		100%	100%	100%	100%
19	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester		23,42%	100%	50,58%	50,58%
20	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil evaluasi peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan prestasi belajar peserta didik		100%	100%	100%	100%
21	Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kandepag pada setiap akhir semester		97,90%	100%	98,68%	98,68%
22	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)		95,64%	100%	97,12%	97,12%



h. Indikator Kinerja Program (IKP) 24: SM menerapkan program penyalarsan dengan dunia kerja

Penyalarsan dengan dunia kerja lebih condong dilakukan oleh jenjang pendidikan menengah kejuruan. Kegiatannya berupa praktek kerja industri, pengembangan potensi wilayah, dan bantuan kewirausahaan.

Tabel 26: SM menerapkan program penyalarsan dengan dunia kerja

No	Output Pendukung	Satuan	Realisasi 2015	2016		Persen
				Target	Realisasi	
1.	Pengembangan SMK Berbasis Industri/Keunggulan Wilayah	Sekolah	n.a.	688	859	125
2.	Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Berikat	Lokasi	83	300	40	
3.	Kerjasama Industri Regional dan Internasional	Kerjasama	1.363.600	1.527.200	1.545.186	
4.	Bantuan Kewirausahaan Siswa SMK	Siswa	50	100	137	
5.	Kerjasama dan Sinergi antar lembaga	Lembaga	n.a.	30	32	106

6. Jumlah Sekolah Rujukan/Model di setiap Kabupaten/Kota

a. Indikator Kinerja Program (IKP) 25: Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 sekolah menengah rujukan/model

Peningkatan mutu pendidikan dilakukan melalui pengembangan pengelolaan pembelajaran dan manajemen sekolah. Unit pembinaan peningkatan mutu pendidikan adalah satuan pendidikan. Oleh karena itu di setiap kabupaten /kota minimal harus terdapat 1 sekolah rujukan/model. Hal ini untuk mempercepat desiminasi inovasi pembelajaran kepada sekolah imbas di setiap kabupaten /kota.



Tabel 27: Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 sekolah menengah rujukan/model

No	Output Pendukung	Satuan	Realisasi 2015	2016		Persen
				Target	Realisasi	
1.	Sekolah Rujukan SD	Sekolah	n.a.	514	452	87,93%
2.	Sekolah Rujukan SMP	Sekolah	n.a.	514	514	100%
3.	Sekolah Rujukan SMA	Sekolah	n.a.	818	818	100%
4.	Sekolah Rujukan SMK	Sekolah	n.a.	156	153	98,07%

b. Indikator Kinerja Program (IKP) 26: Persentase SM yang memenuhi akreditasi minimal B

Mempersiapkan sekolah agar mendapat status akreditasi minimal B dilakukan melalui antara lain, peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran, penyediaan laboratorium IPA, pembangunan perpustakaan, pengembangan kurikulum, dan pembinaan manajemen berbasis sekolah. Intervensi Direktorat Jenderal untuk meningkatkan jumlah sekolah yang berakreditasi

Tabel 28: SM yang memenuhi akreditasi minimal B

No	Output Pendukung	Satuan	Realisasi 2015	2016		Persen
				Target	Realisasi	
1.	Sekolah (SD) yang Mendapat Standarisasi dan Akreditasi	Sekolah	2.085	6.631	7.012	106%
2.	Sekolah (SMP) yang mendapat Standarisasi dan Akreditasi	Sekolah	1.337	2.882	2.586	89,73%
3.	Sekolah (SMA) yang mendapat Standarisasi dan Akreditasi	Sekolah	-	100	8	8%
4.	Sekolah (SMK) yang mendapat Standarisasi dan Akreditasi	Sekolah	-	1.360	1.360	100%



7. Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 standar nasional pendidikan (SNP)

a. Indikator Kinerja Program (IKP) 27: Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya

Peningkatan indeks efektivitas sekolah diukur melalui pemetaan pencapaian satuan pendidikan terhadap Standar Nasional Pendidikan (SNP). Adapun 8 standar tersebut meliputi hal-hal yang terkait dengan sarana dan prasarana, isi, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, pengelolaan pendidikan dan standar proses penilaian.

Tabel 29: satuan pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya

No	Output Pendukung	Satuan	Realisasi 2015	2016		Persen
				Target	Realisasi	
1.	Pemetaan Mutu Sekolah	Sekolah	n.a	185.195	178.772	96,53%
2.	Supervisi Sekolah	Sekolah	n.a	394	415	105%
3.	Fasilitasi Sekolah	Sekolah	n.a	19.584	2.203	11,24%

8. Tata Kelola Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Baik

a. Indikator Kinerja Program (IKP) 28: Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan

Untuk menjamin data pokok pendidikan yang akurat, berkelanjutan dan terbarukan Direktorat Jenderal telah menetapkan SOP Pendataan yang melibatkan seluruh komponen terkait. Adapun mekanisme input data dilakukan oleh operator pada tingkat satuan pendidikan dibawah supervisi kepala sekolah dan tim pendataan kabupaten/kota. Mekanisme updating data dilakukan setiap terjadi transaksi di sekolah, namun secara regular sinkronisasi dilakukan pada setiap awal semester. Data pokok pendidikan telah dimanfaatkan untuk menentukan penyaluran berbagai bantuan pemerintah; tunjangan guru, PIP, BOS, dan bantuan sarana dan prasarana. Selain itu dapodik juga dimanfaatkan untuk mengukur pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP).



Tabel 30: Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru

No	Output Pendukung	Satuan	Realisasi 2015	2016		Persen
				Target	Realisasi	
1.	Data Pendidikan Dasar dan Menengah Akurat, Berkelanjutan dan Terbaru	%	85	87	87	100

b. Indikator Kinerja Program (IKP) 29: Nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (Sangat Baik)

Untuk mencapai kualitas LAKIP yang sangat baik, Direktorat Jenderal harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilengkapi dengan data dukung yang ditetapkan dalam tabel 32.

Tabel 31: Nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (Sangat Baik)

No	Output Pendukung	Satuan	Realisasi 2015	2016		Persen
				Target	Realisasi	
1.	Nilai Minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen Sebesar 80	%	71,09	73,00	76,58	105

B. Pencapaian Program Prioritas

1. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar). Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta



didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

PIP merupakan kerja sama tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag). Besaran dana PIP adalah sebagai berikut :

1. Peserta didik SD/MI/Paket A mendapatkan Rp450.000,-/tahun;
2. Peserta didik SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp750.000,-/tahun;
3. Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp1.000.000,-/tahun.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda/identitas penerima bantuan pendidikan PIP. Kartu ini memberi jaminan dan kepastian anak-anak usia sekolah terdaftar sebagai penerima bantuan pendidikan. Setiap anak penerima bantuan pendidikan PIP hanya berhak mendapatkan 1 (satu) KIP. Dana PIP dapat digunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah/kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi.

Jumlah sasaran dan alokasi anggaran serta realisasi pengaluran PIP Tahun 2015 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 32: sasaran dan alokasi anggaran serta realisasi pengaluran PIP Tahun 2015

Jenjang		Disalurkan	Dicairkan	%
SD	Siswa	10.813.635	9.894.545	91,50
	Rp	4.260.841.200.000	3.918.743.775.000	91,97
SMP	Siswa	4.623.132	4.140.961	89,57
	Rp	2.735.999.625.000	2.456.893.125.000	89,80
SMA	Siswa	1.638.671	1.485.892	90,68
	Rp	1.345.294.000.000	1.224.407.500.000	91,01
SMK	Siswa	1.894.753	1.561.805	82,43
	Rp	1.407.732.000.000	1.160.629.000.000	82,45



Jenjang		Disalurkan	Dicairkan	%
Total:	Siswa	18.970.191	17.083.203	90,05
	Rp	9.749.866.825.000	8.760.673.400.000	89,85

Jumlah sasaran dan alokasi anggaran serta realisasi pengaluran PIP Tahun 2016 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 33: sasaran dan alokasi anggaran serta realisasi pengaluran PIP Tahun 2016

Jenjang		Disalurkan	Dicairkan	%
SD	Siswa	10.900.424	6.946.421	63,73
	Rp	4.209.381.000.000	2.679.377.625.000	63,65
SMP	Siswa	4.797.073	2.088.280	43,53
	Rp	2.732.067.750.000	1.135.361.625.000	41,56
SMA	Siswa	1.655.080	836.968	50,57
	Rp	1.258.009.000.000	614.383.500.000	48,84
SMK	Siswa	1.841.306	1.313.850	71,35
	Rp	1.371.379.500.000	986.671.000.000	71,95
Total:	Siswa	19.193.883	11.185.519	58,28
	Rp	9.570.837.250.000	5.415.793.750.000	56,59

2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang



bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah memenuhi SPM.

Secara khusus program BOS SD dan SMP bertujuan untuk:

- a. membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah;
- b. membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
- c. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), SMA/SMK baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). Khusus bagi sekolah swasta, juga harus memiliki izin operasional.

Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya sebagai berikut:

- a. SD/SDLB : Rp800.000,-/peserta didik/tahun
- b. SMP/SMPLB/Satap/SMPT : Rp1.000.000,-/peserta didik/tahun
- c. SMA/SMK : Rp1.400.000/peserta didik/tahun.

Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa beberapa komponen biaya tetap (fix cost) dari biaya operasi sekolah tidak tergantung pada jumlah peserta didik, maka pemerintah menerapkan kebijakan khusus untuk sekolah dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) orang. Kebijakan khusus tersebut adalah dengan memberikan besar alokasi dana BOS minimal sebanyak 60 (enam puluh) peserta didik, baik untuk sekolah tingkat SD maupun tingkat SMP.

Secara nasional total alokasi anggaran BOS sebesar Rp. 43,814,875,200,000 yang terdiri dari :

1. Jenjang SD : Rp. 21,252,533,600,000; Jumlah siswa 26,565,667 orang
2. Jenjang SMP : Rp. 10,042,234,000,000; Jumlah siswa 10,042,234 orang
3. Jenjang SMA : Rp. 6,373,263,400,000; Jumlah siswa 4,557,525 orang
4. Jenjang SMK : Rp. 6,146,844,200,000; Jumlah siswa 4,390,603 orang

Adapun alokasi anggaran dana BOS perprovinsi adalah sebagaimana tabel berikut:



Tabel 34: Alokasi anggaran dana BOS

No	Provinsi	Anggaran	No	Provinsi	Anggaran
1	2	3	1	2	3
1	Aceh	868,655,400,000	18	Kepulauan Riau	321,829,400,000
2	Bali	759,414,800,000	19	Lampung	1,378,888,000,000
3	Banten	1,276,572,400,000	20	Maluku	411,463,200,000
4	Bengkulu	368,675,600,000	21	Maluku Utara	277,003,400,000
5	DI Yogyakarta	558,407,600,000	22	Nusa Tenggara Barat	756,871,200,000
6	DKI Jakarta	1,568,210,800,000	23	Nusa Tenggara Timur	1,215,798,800,000
7	Gorontalo	151,027,000,000	24	Papua	478,002,000,000
8	Jambi	611,813,200,000	25	Papua Barat	186,639,600,000
9	Jawa Barat	4,987,593,800,000	26	Riau	1,196,172,400,000
10	Jawa Tengah	4,715,023,400,000	27	Sulawesi Barat	276,005,000,000
11	Jawa Timur	4,247,880,400,000	28	Sulawesi Selatan	1,710,680,600,000
12	Kalimantan Barat	947,161,400,000	29	Sulawesi Tengah	577,477,000,000
13	Kalimantan Selatan	588,821,800,000	30	Sulawesi Tenggara	568,363,400,000
14	Kalimantan Tengah	450,751,000,000	31	Sulawesi Utara	494,820,200,000
15	Kalimantan Timur	659,020,600,000	32	Sumatera Barat	1,025,091,200,000
16	Kalimantan Utara	128,935,200,000	33	Sumatera Selatan	1,533,592,600,000
17	Kep. Bangka Belitung	244,274,400,000	34	Sumatera Utara	2,993,016,000,000

3. Pelaksanaan Kurikulum 2013

Implementasi Kurikulum 2013 merupakan langkah strategis dalam menghadapi globalisasi dan tuntutan masyarakat Indonesia masa depan. Titik tekan pengembangan adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Pengembangan kurikulum menjadi amat penting sejalan dengan kontinuitas kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya serta perubahan masyarakat pada tataran lokal, nasional, regional, dan global di masa depan. Aneka kemajuan dan perubahan itu melahirkan tantangan internal dan eksternal pada bidang



pendidikan. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional.

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (standard-based education), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (competency-based curriculum). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warganegara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak.

Kurikulum 2013 menganut : (1) pembelajaran yang dilakukan guru (taught curriculum) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar langsung peserta didik (learned-curriculum) sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut:

- a. Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama;
- b. Pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/ media lainnya);
- c. Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet);
- d. Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains);
- e. Pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim);
- f. Pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia;



- g. Pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (users) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik;
- h. Pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (monodiscipline) menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (multidisciplines); dan
- i. Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;
- b. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;
- c. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;
- d. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- e. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar matapelajaran;
- f. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;
- g. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antarmatapelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

Untuk memfasilitasi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru, serta membantu sekolah mengimplementasikan kurikulum, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pelaksanaan kurikulum jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK secara berjenjang mulai dari Pelatihan Instruktur Nasional, Instruktur Provinsi, Instruktur Kabupaten/Kota dan Guru Sasaran. Pelatihan dan pendampingan pelaksanaan kurikulum tersebut – dengan sejumlah program



pendukung lainnya – diharapkan mampu menjadikan jumlah Sekolah pelaksana kurikulum naik secara signifikan setiap tahunnya, hingga akhirnya pada Tahun Pelajaran 2019/2020 seluruh sekolah dari berbagai jenjang pendidikan telah menggunakan Kurikulum 2013.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Pelatihan Instruktur Kurikulum 2013 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 35: Sasaran dalam Pelatihan Instruktur Kurikulum 2013

No	Jenjang Sekolah	Sekolah sasaran	Sekolah Induk Klaster	Sasaran Pelatihan			Instruktur Kab/Kota (LPMP)	Instruktur Provinsi (Direktorat)	Instruktur Nasional (Direktorat)
				Guru	Kepala Sekolah	Jumlah			
1	SD	27.984	4,099	70.216	27.480	98.061	12.187	340	134
2	SMP	5.342	917	80.016	5.320	85.017	18.504	1.840	154
3	SMA	2.049	545	45.078	2.049	47.127	16.815	1.121	190
4	SMK	1.631	668	44.968	1.606	46.574	19.058	360	162
5	PKLK	2.019		6.921	1.998	8.919	-	-	142
Jumlah		39.025	6.229	247.199	38.453	285.698	66.564	3.661	796

4. Program Vokasi/Kejuruan

Kebijakan pendidikan kejuruan dan ketrampilan mengacu yang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia yang menjadi arah pembangunan pendidikan vokasi ke depan. Dalam Inpres tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat tugas untuk: Dalam Inpres tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat tugas untuk: (1) membuat peta jalan pengembangan SMK; (2) menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*); (3) meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; (4) meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan



dunia usaha/industri; (5) meningkatkan akses, sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan (6) membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK.

Pelaksanaan Program Vokasi/Kejuruan bertitik tolak pada Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016, meliputi empat Kompetensi Keahlian sesuai prioritas kebijakan Pemerintah, yaitu bidang Maritim, Pertanian, Pariwisata dan Teknologi Informasi, yang secara singkat dinyatakan sebagai 4-SATA SMK. Pada tahun 2016 telah ditetapkan Peta Jalan pengembangan SMK sebagai berikut:

Bagan 4 : Peta jalan pengembangan SMK



Peta jalan pengembangan SMK ini merupakan salah satu alat untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja terampil dan penyerapan tenaga kerja lulusan SMK di dunia kerja dan industri. Sebagai ilustrasi kesenjangan jumlah lulusan SMK pada sembilan bidang keahlian dengan kebutuhan tenaga kerja sebagai berikut:



Tabel 36: Perbandingan Kebutuhan Tenaga Kerja dengan Lulusan SMK 2016

Perbandingan Kebutuhan Tenaga Kerja dengan Lulusan SMK 2016

No.	Bidang Keahlian	Lulusan SMK 2016	Peluang Kebutuhan Tenaga Kerja	Kelebihan (+)/ Kekurangan(-)
1	Teknologi dan Rekayasa	441.561	611.644	170.083
2	Energi dan Pertambangan	3.486	27.008	23.522
3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	277.545	327.813	50.268
4	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	60.944	68.245	7.301
5	Agribisnis dan Agroteknologi	52.319	445.792	393.473
6	Kemaritiman	17.249	3.364.297	3.347.048
7	Bisnis dan Manajemen	348.954	119.255	- 229.699
8	Pariwisata	82.171	707.600	625.429
9	Seni dan Industri Kreatif	12.017	88.133	76.116
TOTAL		1.296.246	5.759.787	4.463.541

1. Kekurangan lulusan terbesar adalah bidang perikanan dan kelautan, karena terhambat dengan aproval dari peraturan di kementerian Perhubungan;

2. Bidang TIK tumbuh sangat besar karena banyak calon guru yang bisa mengajar substansi TIK. Yang diperlukan adalah tatalang bidang keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar;

3. Bidang Bisnis dan manajemen adalah yang berlebih lulusan, karena penyelenggaraannya mudah dan murah. Umumnya SMK yang dikelola masyarakat membuka bidang keahlian ini. Untuk itu perlu revitalisasi dan penataan ulang.

16

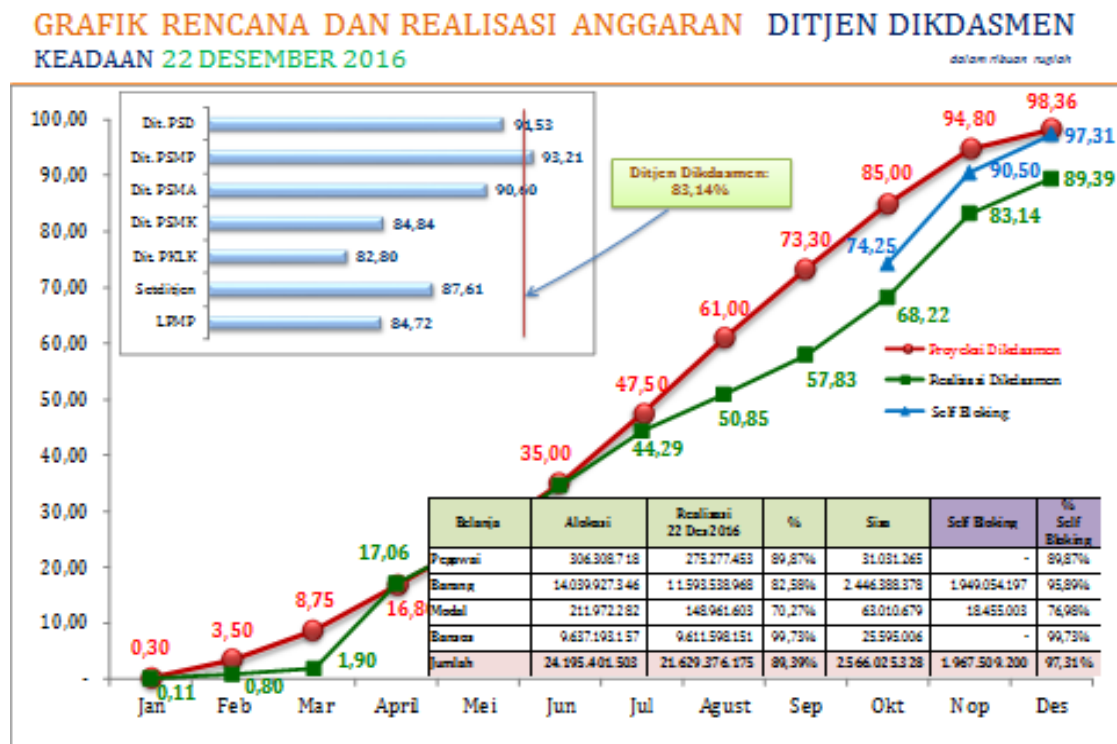
Implementasi undang undang 23 tahun 2014 yang melimpahkan pengelolaan SMK kepada provinsi akan menajamkan ketepatan pemenuhan *supply-demand* tenaga kerja lintas Kab./Kota. Dari 7,56 juta total pengangguran terbuka, 20,76% berpendidikan SMK (BPS, 2015). Hanya 22,3% guru SMK yang mengajar sesuai bidang keterampilan (guru produktif). Pendidikan vokasi belum *link-and-match* dengan DUDI (dunia usaha/industri).



C. Pencapaian Kinerja Keuangan

1. Pencapaian Kinerja Keuangan

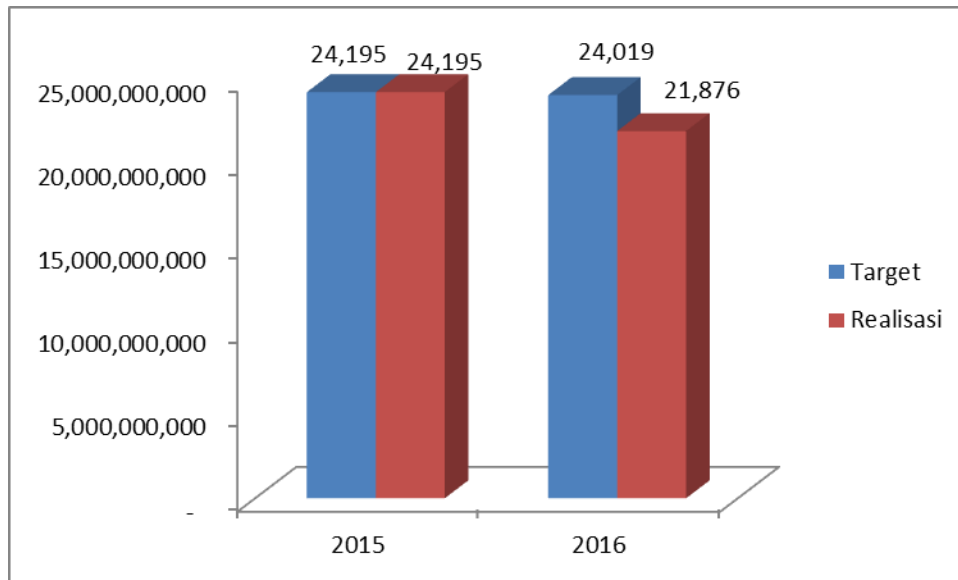
Grafik 3: Rencana dan realisasi anggaran Ditjen Dikdasmen



2. Analisis Kinerja Keuangan

Pelaksanaan Anggaran tahun 2016 dengan PAGU awal sebesar Rp.27.505.148.662.000 Berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2016 tentang langkah langkah penghematan belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun anggaran 2016, dilakukan perubahan anggaran menjadi Rp.24.195.401.503.000 Pada pertengahan semester dua Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan *self-blocking* sebesar Rp.1.967.509.200.000,- (8,13%) Dari Total anggaran Ditjen Dikdasmen yang telah dikurangi *selfblocking* terealisasi sebesar Rp.21.876.724.060 sehingga kinerja keuangan Direktorat Jenderal adalah 91,87%.

Grafik 4: Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 dan 2016:



Tabel 37: Perbandingan Realisasi Tahun 2015 dengan 2016

(dalam ribuan)

Kode	Program	2015	2016			
		Realisasi	Pagu Awal	APBNP	Realisasi	%
23	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	Rp.24.019.870.129	Rp.27.505.148.662	Rp.24.195.401.503	Rp.21.876.724.060	90,42
2003	Direktorat Pembinaan SD	Rp.6.384.934.315	Rp.6.489.524.991	Rp.6.096.052.240	Rp.5.637.400.705	92,48
2000	Direktorat Pembinaan SMP	Rp.5.369.524.161	Rp.6.331.261.820	Rp.5.457.392.073	Rp.5.100.525.614	93,46
5626	Direktorat Pembinaan PKLK	Rp.558.007.984	Rp.908.289.209	Rp.735.808.717	Rp.620.580.542	84,34
5627	Direktorat Pembinaan SMA	Rp.4.643.300.516	Rp. 4.794.045.523	Rp.3.938.758.729	Rp.3.580.931.037	90,92
5628	Direktorat Pembinaan SMK	Rp.5.552.932.544	Rp.6.151.106.134	Rp.5.261.793.429	Rp.4.483.301.250	85,20
2005	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	Rp.263.739.866	Rp. 372.211.462	Rp. 299.212.782	Rp. 267.090.203	89,26
5630	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)	Rp.359.073.146	Rp.1.845.953.240	Rp.1.937.186.330	Rp.1.752.632.217	90,47



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah secara umum sudah sesuai dengan program rencana kerja yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan oleh kinerja keuangan yang mencapai 98,42%. Namun demikian kinerja keuangan ini tidak secara langsung dapat mendukung pencapaian indikator kinerja program (IKP) sebagaimana tertuang di dalam RKP dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal. Beberapa IKP terkait dengan ketersediaan akses dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah tidak mencapai target 100%.
2. Penyusunan capaian kinerja organisasi masih terkendala oleh tersendatnya arus data dan informasi dari pengelola kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan penganggaran pada awal tahun anggaran yang berdampak pada pergeseran target sasaran tahun 2016. Perubahan anggaran ini terjadi pula pada program prioritas nasional yaitu pembinaan pendidikan karakter. Dengan demikian beberapa sasaran pendidikan karakter tidak tercapai.
3. Salah satu indikator peningkatan mutu layanan dan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah pemenuhan 8 aspek standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan pemetaan mutu pendidikan yang dilakukan pada tahun 2016, sebagian besar satuan pendidikan pada kategori 2 dan 3 dari skor tertinggi 5. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya mewujudkan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah yang menjadi urusan wajib daerah.

B. Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan efektifitas kinerja lembaga sasaran dan program kegiatan/output kinerja disusun untuk memenuhi target kinerja program (IKP). Dengan demikian kinerja keuangan berbanding lurus dengan kinerja program.
2. Peningkatan kualitas kinerja dapat dicapai antara lain melalui sistem pengendalian program dan kegiatan secara periodik untuk mengukur ketepatan input proses dan sasaran yang ingin dicapai, pengendalian dapat efektif jika ada pedoman pemantauan dan evaluasi kinerja program dan sasaran sebagai acuan. Oleh karena itu setiap



komponen pendukung kinerja berpegang pada sistem dan mekanisme pelaporan yang ada.

3. Sosialisasi dan publikasi terhadap hasil pengukuran kinerja pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah sebaiknya dapat dilakukan oleh Ditjen Dikdasmen untuk mendorong daerah memenuhi urusan wajibnya dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pengelolaan pendidikan yang efektif.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2017**